

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2019 telah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan tahunan ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu 2019, dengan maksud untuk melihat sejauhmana hasil kerja yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi pengawasan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Badan Pengawasan diharapkan dapat memberikan nuansa perubahan untuk dapat mewujudkan kepercayaan publik kepada badan peradilan.

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana pengawasan dan peningkatan sarana yang berkaitan dengan pedoman pelaksana tugas pengawasan serta adanya akses kemudahan Sistem Informasi Pengawasan dalam penyampaian Laporan/ Pengaduan.

Kiranya Laporan Tahunan Badan Pengawasan ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja Badan Pengawasan dan dapat memberikan gambaran mengenai upaya nyata untuk melakukan pembenahan terhadap tertib pelaksanaan tugas yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh Aparat Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas khususnya berkaitan dengan pelayanan penanganan pengaduan dan terwujudnya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

Jakarta, 30 Januari 2020

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI


NUGROHO SETIADI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Umum.....	1
B. Visi dan Misi.....	1
C. Rencana Strategis.....	2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI.....	3
A. Standard Operational Procedures (SOP)	7
B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	12
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	13
A. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	13
B. Pengelola Sarana dan Prasarana	42
C. Pengelolaan Keuangan.....	50
D. Regulasi Tahun 2019.....	55
BAB IV PENGAWASAN.....	57
A. PROGRAM PEMBAHARUAN.....	57
1. Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0	57
2. Penerapan Pilot Project Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001	59
B. PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN	61
1. Penanganan Pengaduan	61
2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim.....	62
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	64
4. Penguatan Sistem Pengawasan.....	65
a. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan.....	65
b. Consulting Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan.....	66
c. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)	66
5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler.....	67
a. Pemeriksaan Reguler	67
b. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP.....	68
6. Pemeriksaan Monitoring.....	69
7. Satuan Tugas Khusus Pengawasan.....	69
8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas.....	70
9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	72
10. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	74
11. Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)	78
12. Inspeksi Mendadak (SIDAK).....	80
13. Penyamaran (Mystery Shopping)	80
14. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	81
15. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	82

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)	83
D. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK	87
E. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)	87
F. <i>INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL</i> (IACM)	88
G. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I	88
H. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)	90
I. SURVEY KEPUASAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN	90
J. PENERIMAAN PENGHARGAAN DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	91
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	92
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pengawasan yang lebih baik.

Penanganan Pengaduan merupakan salah satu kinerja utama pada Badan Pengawasan sebagaimana yang terdapat pada Perma No 9 Tahun 2016. Salah satu penunjang keberhasilan penanganan pengaduan tersebut adalah adanya dukungan Teknologi Informasi yang terintegrasi dari pusat sampai pada satker di daerah yang dikenal dengan Aplikasi Siwas MA RI.

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik diantaranya dengan penyempurnaan Aplikasi Siwas yang saat ini versi 3.

Selain Aplikasi Siwas MA RI, Badan Pengawasan juga berupaya mengembangkan Aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya mewujudkan Misi Badan Pengawasan yaitu Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B. Visi dan Misi

Dalam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung", dan dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut Badan Pengawasan telah menetapkan Visi yaitu "*Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa*".

Yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

C. Rencana Strategis

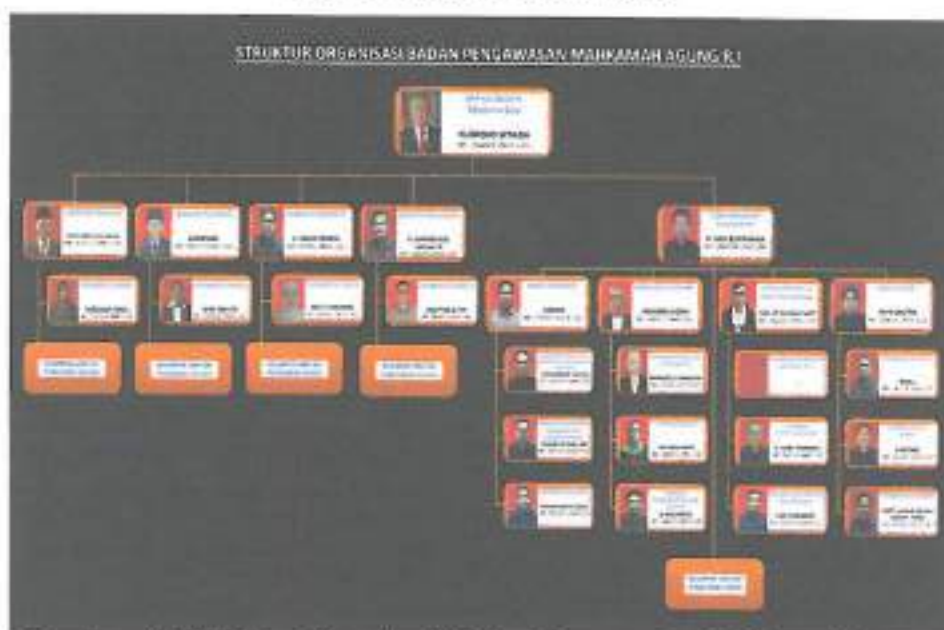
Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler		
	Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas		
	Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa		
	Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan		
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan		
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana		
	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang		
	Jumlah pegawai yang mengikuti Assesment		
	Jumlah Penguatan APIP		
	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan		
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan		
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan		
		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, struktur organisasi badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdiri dari:

1. Eselon I

Badan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

2. Eselon II

Susunan Organisasi Eselon II Badan Pengawasan terdiri dari :

a. Sekretaris Badan Pengawasan

Sekretariat Badan Pengawasan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;

- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- 4) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

b. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Sumatera yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

c. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Jawa dan Bali yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;

- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

d. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

e. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;

- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

3. Eselon III

Organisasi Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Eselon II), yang didukung dengan jabatan struktural dibawahnya yang meliputi :

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta pembuatan Laporan Keuangan dan verifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;
- 2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- 3) Sub Bagian Akuntansi.

b. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, pengajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Mutasi;

3) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi;
- 3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

d. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- 2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Perlengkapan.

A. Standard Operational Procedures (SOP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2018 telah melakukan evaluasi dan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap beberapa SOP yang sudah tidak sesuai lagi dan penambahan SOP berdasarkan kebutuhan organisasi, yaitu :

1. Evaluasi atas Pemenuhan Kebutuhan SOP Organisasi

SOP yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan organisasi dalam penataan hubungan kerja, sehingga diperlukan beberapa penambahan SOP baru guna memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada pada Badan Pengawasan yaitu:

a. SOP KEPEGAWAIAN :

SOP Penanganan Penilaian Jabatan Fungsional Auditor Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

b. SOP UMUM

SOP Penggunaan BMN

c. SOP KEUANGAN

- 1) Standard Operating Procedures (SOP) Usulan Revisi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 2) SOP Monitoring Evaluasi Kinerja (Monev Bappenas) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 3) SOP Monitoring Evaluasi Anggaran (Monev Smart DJA) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

d. SOP ORTALA

- 1) Standar Operasional Prosedur Publikasi Konten Berita Website
- 2) Standar Operasional Prosedur Publikasi Konten Berita Website
- 3) Standar Operasional Prosedur Perbaikan Perangkat Keras Komputer
- 4) Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Jaringan
- 5) Standar Operasional Prosedur Perbaikan Perangkat Lunak Komputer
- 6) SOP Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan, Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software)
- 7) SOP Pembuatan Sistem Aplikasi

e. SOP IRWIL

- 1) SOP Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

f. SOP AUDITOR

- 1) SOP Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 2) SOP Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Terhadap Satker Yang Telah Memperoleh WBK Dan WBBM
- 3) SOP Penilaian Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

2. Evaluasi atas Format dan Kelengkapan SOP

Dokumen SOP yang dibuat dan sesuai dengan format dan kelengkapan yang diatur dalam Pedoman Penyusunan SOP tetapi diperlukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu :

a. KEPEGAWAIAN

- 1) **001/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Dengan Pangkat III/D Ke Bawah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

- 2) **002/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Usulan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 3) **003/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Dengan Pangkat IV/A Ke Atas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 4) **004/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Untuk Pegawai Dengan Pangkat III/D Ke Bawah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 5) **005/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Administrasi Surat Tugas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 6) **006/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Hakim Tinggi Dan Hakim Yustial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 7) **007/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Administrasi Cuti Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 8) **008/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 9) **009/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Administrasi Jabatan Fungsional Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 10) **010/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Administrasi Surat Keluar Kepegawaian Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 11) **011/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pembuatan Surat Keputusan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 12) **012/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 13) **013/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pelaksanaan Acara Pelantikan Pejabat Struktural Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 14) **014/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Usulan Pembuatan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 15) **015/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pelaksanaan Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 16) **016/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pelaksanaan Acara Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 17) **017/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 18) **018/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) Dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPMJ) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 19) **019/BP/KP.01.3/08/2019** SOP Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

- 20) **019/BP.1/KP.01.3/08/2019** SOP Penanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Untuk Hakim Tinggi, Hakim Yustisial Dan Pegawai Dengan Pangkat IV/A Ke Atas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

b. UMUM

- 1) **001/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Penyiapan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia
- 2) **002/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Pengelolaan Arsip Inaktif
- 3) **003/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Evaluasi Sakip Satker Lingkungan Mahkamah Agung RI
- 4) **004/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Pemeriksaan Reguler Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 5) **005/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Pemeriksaan Kinerja Dan Integritas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 6) **006/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Monitoring Pemeriksaan Internal
- 7) **007/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Inspeksi Mendadak (SIDAK)
- 8) **008/BP/UM.01.3/08/2019** SOP Komunikasi Internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 9) **009/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Penanganan Hal – Hal Yang Membatasi Ruang Lingkup Audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 10) **010/BP.1/UM.01.3/08/2019** Standar Operating Procedures (*Standard Operating Procedures*) Meja Pengaduan Eselon I Pada Mahkamah Agung RI
- 11) **011/BP/UM.01.3/08/2019** SOP Penanganan Pengaduan(Whistleblowing System) Melalui Aplikasi Siwas MA-RI Pada Irwil I s/d IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 12) **012/BP.1/UM.01.3/08/2019** Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) Klarifikasi Dan Konfirmasi Atas Pengaduan
- 13) **013/BP.1/UM.01.3/08/2019** Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) Delegasi Penanganan Pengaduan Kepada Pengadilan Tingkat Banding
- 14) **014/BP.1/UM.01.3/08/2019** Standard Operating Procedures (SOP) Rehabilitasi Terlapor Pengaduan Tidak Terbukti
- 15) **015/BP.1/UM.01.3/08/2019** Standard Operating Procedures (SOP) Pemeriksaan Oleh Tim Pemeriksa Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 16) **016/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Pemeriksaan Kasus
- 17) **017/BP.1/UM.01.3/08/2019** SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
- 18) **052/BP.1/OT.01.3/04/2014** SOP Pengembalian BMN

- 19) 053/BP.1/OT.01.3/04/2014 SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)

c. KEUANGAN

- 1) 001/BP.1/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dan Program Badan Pengawasan
- 2) 002/BP.1/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Renstra Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 3) 005/BP.1/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawasan
- 4) 006/BP.1/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran LS Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 5) 007/BP.1/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Belanja Pegawai Dan Kekurangannya Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 6) 008/BP.1/KU.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
- 7) 009/BP.1/KU.01.3/08/2019 SOP Laporan Keuangan SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)

d. ORTALA

- 1) 001/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan
- 2) 002/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung
- 3) 003/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Tayangan Hukuman Disiplin Pada Website Badan Pengawasan MA RI
- 4) 004/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung
- 5) 005/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengawasan
- 6) 006/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Layanan Perpustakaan
- 7) 007/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Peliputan Kegiatan
- 8) 008/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
- 9) 009/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus
- 10) 010/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Pengelolaan Arsip Lhp
- 11) 011/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
- 12) 012/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penerimaan Buku Perpustakaan
- 13) 013/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Peminjaman LHP

B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. Aparatur Badan Pengawasan telah menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi.

Pada tahun 2019 SKP telah diterapkan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat, pensiun dan penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial 17 (tujuh belas) orang, kenaikan pangkat Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum 28 (dua puluh delapan) orang serta Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang purnabakti 3 (tiga) orang sebagai dasar kenaikan pangkat pengabdian.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, dan Honorer yang terdiri dari:

a) Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : 1 orang
- Pejabat Eselon II : 5 orang (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 4 orang
- Pejabat Eselon IV : 15 orang

b) Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 43 orang
- Hakim Yustisial : 19 orang
- Auditor : 21 orang
- Auditor Kepegawaian : 8 orang
- Pustakawan : 1 Orang
- Analis Kepegawaian : 1 orang
- Pranata Komputer : 2 orang
- Arsiparis : 1 Orang

c) Staf : 30 orang

d) Honorer : 16 orang

Pada tahun 2019, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer, kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Pejabat Struktural

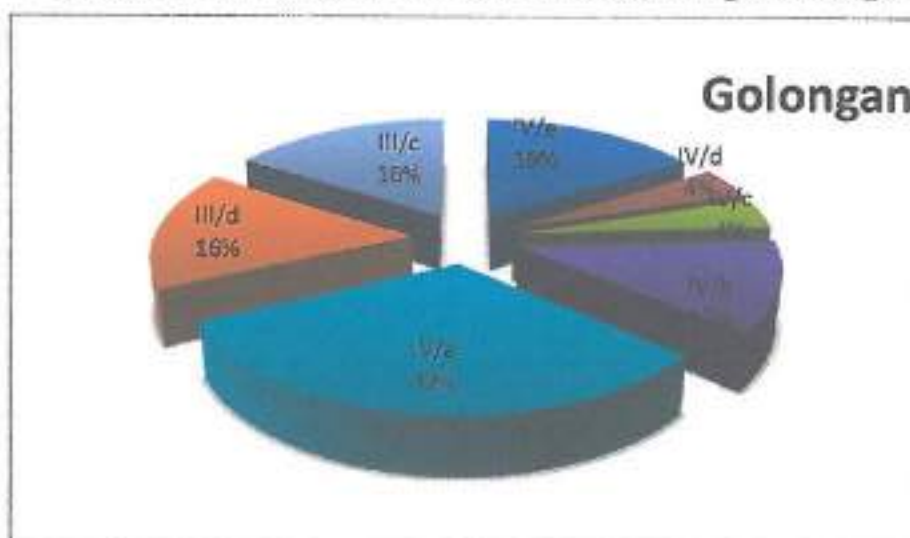
Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Adapun untuk pengelompokan Pejabat Struktural ini

berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin dapat dilihat pada tabel 3.1.1, tabel 3.1.2, tabel 3.1.3 dan tabel 3.1.4.

Tabel 3.1.1 Data Pejabat Struktural berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	4	16 %
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	4 %
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	4 %
4.	Pembina Tk I (IV/b)	3	12 %
5.	Pembina (IV/a)	8	32 %
6.	Penata Tk I (III/d)	4	16 %
7.	Penata (III/c)	4	16 %

Grafik 3.1.1 Data Pejabat Struktural berdasarkan Pangkat/Golongan



Tabel 3.1.2 Data Pejabat Struktural berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	1	4 %
2.	S2	20	80 %
3.	S1	4	16 %

Grafik 3.1.2 Data Pejabat Struktural berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.1.3 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 39	5	20 %
2.	40 – 49	4	16 %
3.	50 – 59	14	56 %
4.	60 – 69	2	8 %

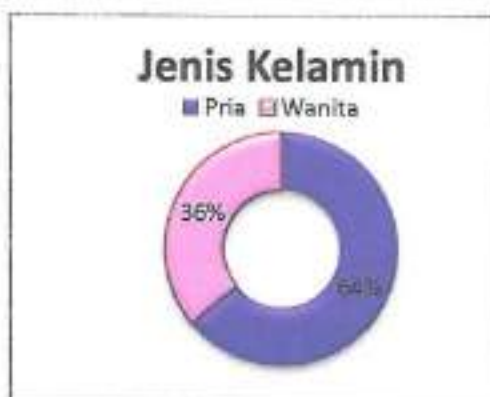
Grafik 3.1.3 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia



Tabel 3.1.4 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	16	64 %
2.	Wanita	9	36 %

Grafik 3.1.4 Data Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin



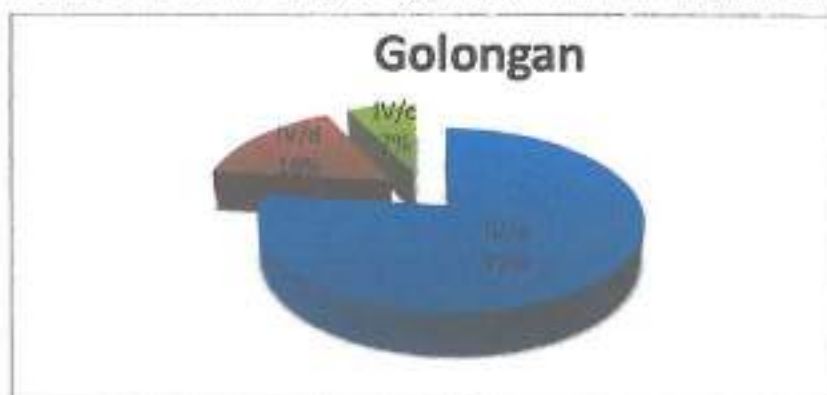
1.2. Pejabat Fungsional

Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 91 (Sembilan puluh satu) orang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pustakawan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis. Adapun pangkat/golongan, pendidikan, usia dan jenis kelamin tenaga teknis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	33	77 %
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	7	16 %
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	7 %

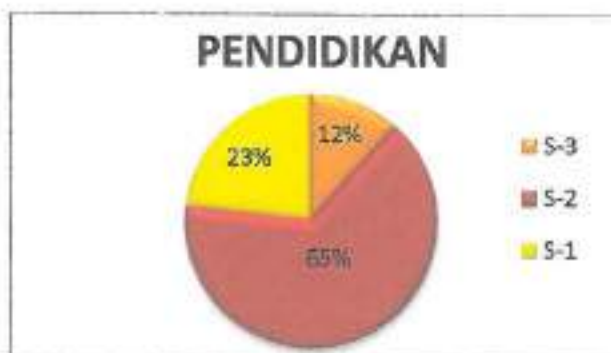
Grafik 3.2.1 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pangkat/Golongan



Tabel 3.2.2 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	5	12 %
2.	S2	28	65 %
3.	S1	10	23 %

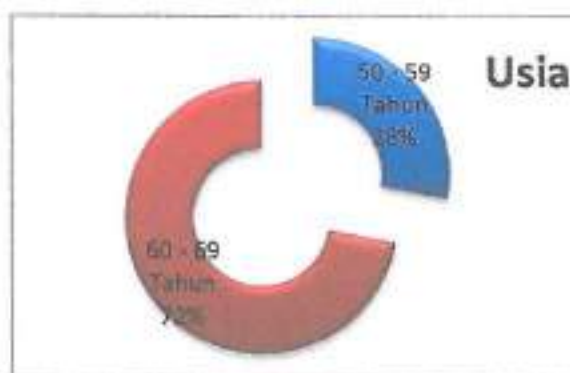
Grafik 3.2.2 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.2.3 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 59	12	28%
2.	60 – 69	31	72%

Grafik 3.2.3 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Usia



Tabel 3.2.4 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	38	88 %
2.	Wanita	5	12 %

Grafik 3.2.4 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Jenis Kelamin

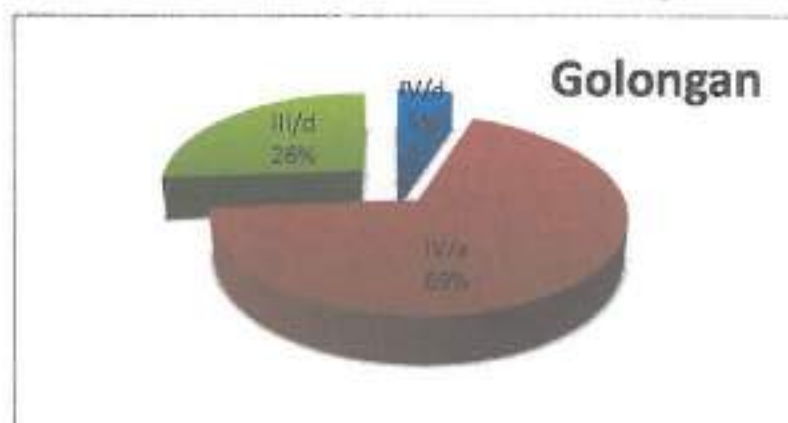


1.3. Hakim Yustisial

Tabel 3.3.1 Data Hakim Yustisial berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama Muda (IV/d)	1	5 %
2.	Pembina (IV/a)	13	69 %
3.	Penata Tk. I (III/d)	5	26%

Grafik 3.3.1 Data Hakim Yustisial berdasarkan Pangkat/Golongan



Tabel 3.3.2 Data Hakim Yustisial berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	3	16 %
2.	S2	13	68 %
3.	S1	3	16 %

Grafik 3.3.2 Data Hakim Yustisial berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.3.3 Data Hakim Yustisial berdasarkan Usia.

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 39	6	32 %
2.	40 – 49	12	63 %
3.	50 – 59	1	5 %

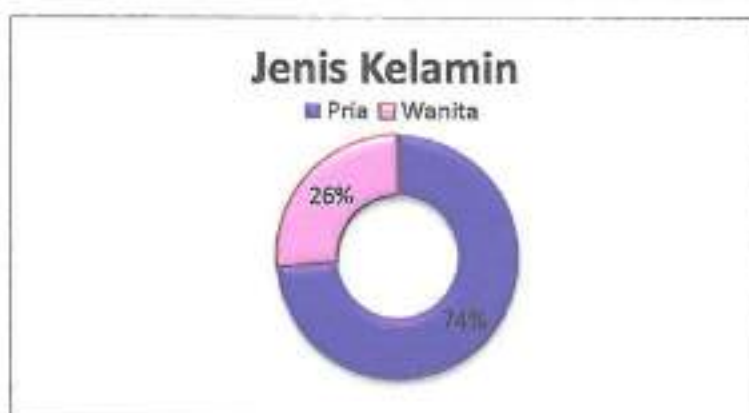
Grafik 3.3.3 Data Hakim Yustisial berdasarkan Usia.



Tabel 3.3.4 Data Hakim Yustisial berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	14	74 %
2.	Wanita	5	26 %

Grafik 3.3.4 Data Hakim Yustisial berdasarkan Jenis Kelamin



1.4. Auditor

Tabel 3.4.1 Data Auditor berdasarkan Pangkat/Golongan.

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina (IV/a)	1	5 %
2.	Penata Tk. I (III/d)	6	28 %
3.	Penata (III/c)	6	29 %
4.	Penata Muda Tk.I (III/b)	8	38 %

Grafik 3.4.1 Data Auditor berdasarkan Pangkat/Golongan.



Tabel 3.4.2 Data Auditor berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	12	57 %
2.	S1	9	43 %

Grafik 3.4.2 Data Auditor berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.4.3 Data Auditor berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20 – 29	3	14 %
2.	30 – 39	13	62 %
3.	40 – 49	5	24 %

Grafik 3.4.3 Data Auditor berdasarkan Usia



Tabel 3.4.4 Data Auditor berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	19	90 %
2.	Wanita	2	10 %

Grafik 3.4.4 Data Auditor berdasarkan Jenis Kelamin

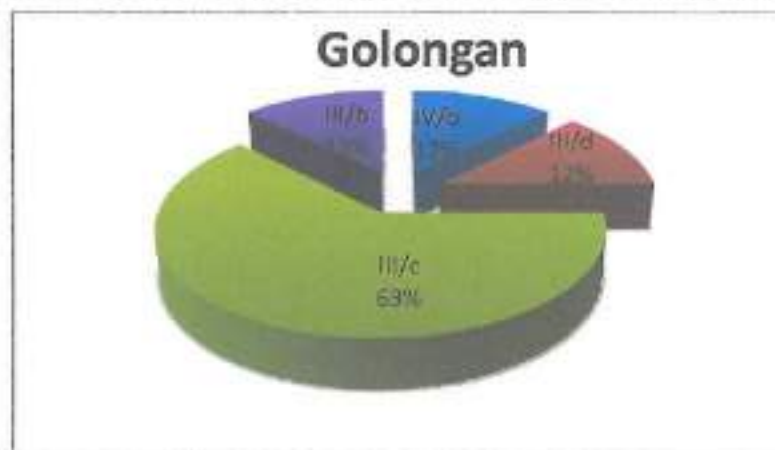


1.5. Auditor Kepegawaian

Tabel 3.5.1 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina (IV/b)	1	12%
2.	Penata Tk. I (III/d)	1	12 %
3.	Penata (III/c)	5	63 %
4.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	13 %

Grafik 3.5.1 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Pangkat/Golongan



Tabel 3.5.2 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	2	25 %
2.	S1	6	75 %

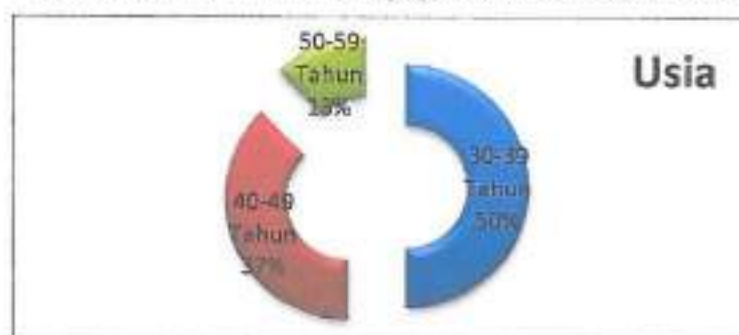
Grafik 3.5.2 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.5.3 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 39	4	50 %
2.	40 –49	3	37 %
3.	50 – 59	1	13 %

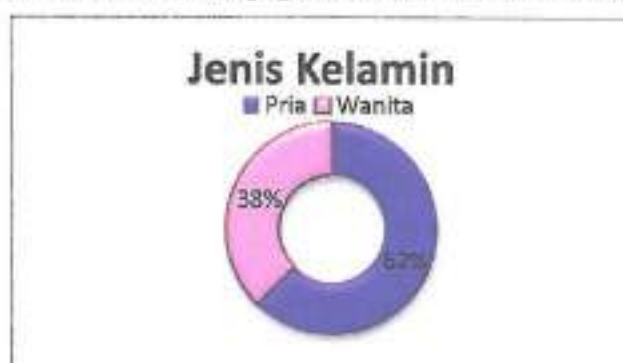
Grafik 3.5.3 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Usia



Tabel 3.5.4 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	5	62 %
2.	Wanita	3	38 %

Grafik 3.5.4 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin



1.6. Pustakawan

Tabel 3.6.1 Data Pustakawan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina (IV/a)	1	100 %

Tabel 3.6.2 Data Pustakawan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	1	100 %

Tabel 3.6.3 Data Pustakawan berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 59	1	100 %

Tabel 3.6.4 Data Pustakawan berdasarkan Jenis Kelamin

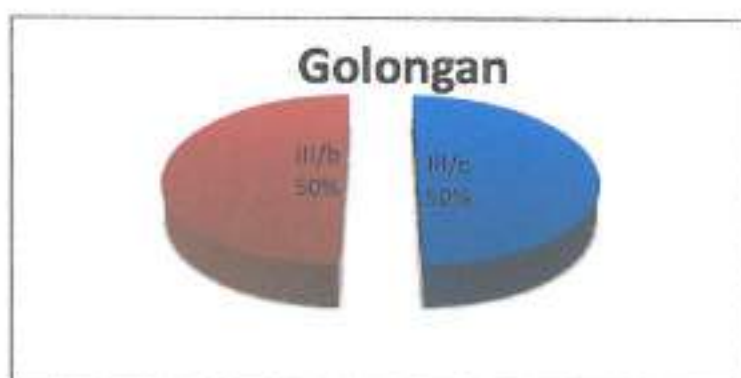
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Wanita	1	100%

1.7. PranataKomputer

Tabel 3.7.1 Data Pranata Komputer berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata (III/c)	1	50 %
2.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	50 %

Grafik 3.7.1 Data Pranata Komputer berdasarkan Pangkat/Golongan



Tabel 3.7.2 Data Pranata Komputer berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-1	2	100 %

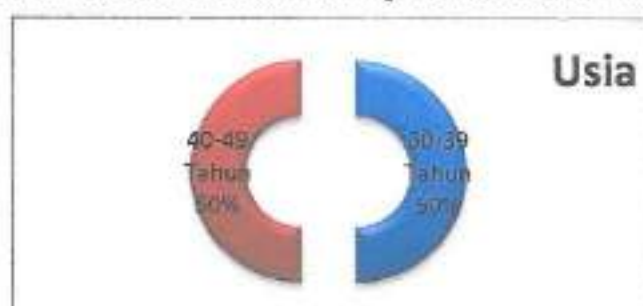
Grafik 3.7.2 Data Pranata Komputer berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.7.3 Data Pranata Komputer berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 39	1	50 %
2.	40 – 49	1	50 %

Grafik 3.7.3 Data Pranata Komputer berdasarkan Usia



Tabel 3.7.4 Data Pranata Komputer berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	2	100%
2.	Wanita	0	0 %

Grafik 3.7.4 Data Pranata Komputer berdasarkan Jenis Kelamin



1.8. Analisis Kepegawaian

Tabel 3.8.1 Data Analisis Kepegawaian berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata (III/c)	1	100 %

Tabel 3.8.2 Data Analisis Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	SLTA	1	100 %

Tabel 3.8.3 Data Analisis Kepegawaian Kepegawaian berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 59	1	100 %

Tabel 3.8.4 Data Analisis Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	0	0%
2.	Wanita	1	100 %

1.9. Analisis Arsiparis

Tabel 3.9.1 Data Arsiparis berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	100 %

Tabel 3.9.2 Data Arsiparis berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	1	100 %

Tabel 3.9.3 Data Arsiparis Kepegawaian berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 39	1	100 %

Tabel 3.9.4 Data Arsiparis berdasarkan Jenis Kelamin

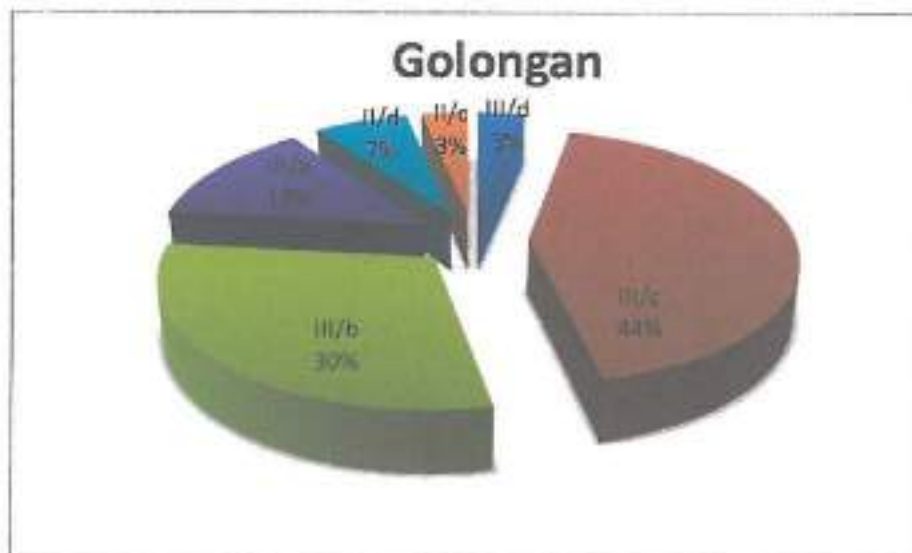
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	1	100%
2.	Wanita	0	0 %

1.10. Staf

Tabel 3.10.1 Data Staf berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Tk. I (III/d)	1	3 %
2.	Penata (III/c)	13	44 %
3.	Penata Muda Tk.I (III/b)	9	30 %
4.	Penata Muda (III/a)	4	13 %
5.	Pengatur Tk. I (II/d)	2	7 %
6.	Pengatur (II/c)	1	3 %

Grafik 3.10.1 Data Staf berdasarkan Pangkat/Golongan



Tabel 3.10.2 Data Staf berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	8	27 %
2.	S1	17	57 %
3.	D3	1	3 %
4.	SLTA	4	13 %

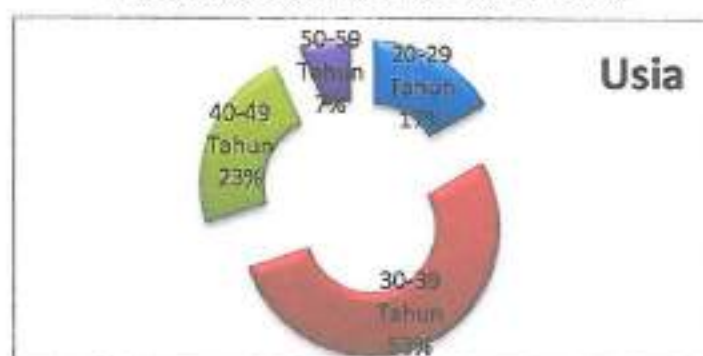
Grafik 3.10.2 Data Staf berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.10.3 Data Staf berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20-29	8	17 %
2.	30-39	16	53 %
3.	40-49	7	23 %
4.	50-59	2	7 %

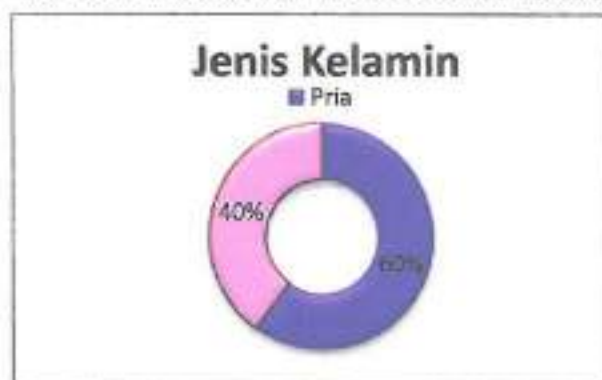
Grafik 3.10.3 Data Staf berdasarkan Usia



Tabel 3.10.4 Data Staf berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	18	60 %
2.	Wanita	12	40 %

Grafik 3.10.4 Data Staf berdasarkan Jenis Kelamin

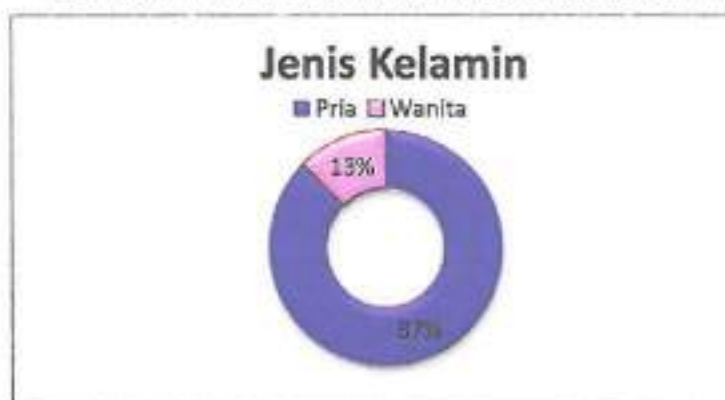


1.11 Honorer

Tabel 3.11.1 Data Honorer berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	14	87 %
2	Wanita	2	13 %

Grafik 3.11.1 Data Honorer berdasarkan Jenis Kelamin



2. PEGAWAI YANG LULUS PASCA SARJANA/S2 PADA TAHUN 2019 SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG.

Tabel 3.11 Data Pegawai yang Lulus Pasca Sarjana/S2

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Dr. Drs. H. Sumasno,S.H., M.Hum	Doktor (Dr)	Disetujui BKN
2.	Mochtar Luthfi, S.H., M.H	Magister Hukum	Disetujui BKN
3.	Dwi Era Wahyuni, S.Psi., M.M.	Magister Managemen	Disetujui BKN
4.	Sahreza Harahap, S.E., S.H., Ak	SarjanaHukum dan Akuntansi	Disetujui BKN
5.	Edi Gustiawan, S.H., M.M.	Magister Managemen	Disetujui BKN
6.	Abu Samah, S.E., Ak., M.M.	Magister Managemen	Disetujui BKN
7.	Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi	Magister Hukum	Disetujui BKN

3. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MARI

Tabel 3.12 Data Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi Pengawas

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Amnal Umam, SH, MH	Hakim Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
2.	Jupriyadi, SH, M Hum	Hakim Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
3.	Joseph Franses Ebenson Fina, S.H. M.H.	Hakim Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Samarinda	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
4.	H Sutiyono, SH, MH	Hakim Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
5.	Suradi, S.H., S.Sos., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Hakim Tindak Pidana Korupsi Mataram	Pembina Utama Muda/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jambi dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
6.	Noor Edi Yono, S.H., M.H	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Mataram	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Mataram dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
7.	Sugiyanto, S.H	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
8.	H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan MARI
9.	Dr. H. Mustamar, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar	Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan MARI
10.	Drs. Sudirman S., S.H	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ternate
11.	Agus Subroto, SH, M.	Kepala Pusat	Hakim Tinggi pada Badan

	Hum	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI	Pengawasan MARI
--	-----	---	-----------------

4. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN SEKRETARIS PADA BADAN PENGAWASAN MARI

Tabel 3.13 Data Promosi dan Mutasi Jabatan Sekretaris

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd	Sekretaris pada Badan Pengawasan MARI	Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama DKI
2.	Drs. H. Andi Kurniawan, MM	Sekretaris pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI	Sekretaris pada Badan Pengawasan MARI

5. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN HAKIM YUSTISIAL PADA BADAN PENGAWASAN MARI

Tabel 3.14 Data Promosi dan Mutasi Jabatan Hakim Yustisial

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Bayuardi, S.H., M.H	Penata Tk. I/Hakim Pratama Utama pada PN. Cianjur	Penata Tk. I/Hakim Pratama Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) MARI diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI
2.	Dr. Supandriyo, S.H., M.H	Penata Tk. I/Hakim Pratama Utama pada PN. Magelang	Penata Tk. I/Hakim Pratama Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) MARI diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI
3.	Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si	Pembina/Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Depok	Pembina/Hakim Madya Pratama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) MARI diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI
4.	Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H	Penata Tk. I/Hakim Pratama Utama pada PN. Stabat	Penata Tk. I/Hakim Pratama Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) MARI diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI
5.	Andi Muhammad Yusuf Bakry, S. Hi., M.H	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Pratama Utama/Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI

6.	Dr. Sultan, S.Ag., SH., MH	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Kasubdit mutasi Hakim Direktorat Bingingis Badan Peradilan Agama
----	-------------------------------	--	--

6. PROMOSI DAN MUTASI FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MARI

Tabel 3.15 Data Promosi dan Mutasi Fungsional Umum

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Sersan Mayor Fahri Soleh	Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI

7. PROMOSI FUNGSIONAL UMUM MENJADI FUNGSIONAL TERTENTU PADA BADAN PENGAWASAN MARI

Tabel 3.16 Data Promosi Fungsional Umum menjadi Fungsional Tertentu

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Sri Misgianti, S.E., MH	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Pustakawan Madyapada Badan Pengawasan MARI
2.	Yugus Dwi Prasetyo, S.E	Fungsional Umum pada Kasubag Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan MARI	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI
3.	Rezky Azhari, S.Psi	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
4.	Syarifullah Nur, S.Kom	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
5.	Bram Budi Nurcahyo, S.E., Ak., MH	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	ArsiparisPertamapada Badan Pengawasan MARI
6.	Muhammad Huzairah, S.Kom.	Fungsional Umum pada pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Pranata Komputer Pertama pada Badan Pengawasan MARI
7.	Sahreza Harahap, SE., SH., Ak., C.P.A	Fungsional Umum pada pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
8.	Dwi Febri Yandi, SE., M.S. Ak.	Fungsional Umum pada pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
9.	Sanda Fajelius Hasibuan, SH	Fungsional Umum pada pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
10.	Davis Rozano Besthari, S.Si	Fungsional Umum pada pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI
11.	Suriyanto, SH	Fungsional Umum pada pada	Auditor Pertama pada

		Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Badan Pengawasan MARI
12.	Yuan Cynthia Boru Simanjuntak, S.P.	Fungsional Umum pada pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI

8. KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2019

Tabel 3.17 Data Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Musa La Haji, S.H.I	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI
2.	Sutrisno, S.H.I	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI
3.	Faizal Amir, S.H	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI
4.	Nur Susana Tifa, S.E	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI
5.	Zullvan Sugiantoro, S.T	Pranata Komputer Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Pranata Komputer Muda pada Badan Pengawasan MARI
6.	Muhammad Anis, SE., Ak., C.A., M.Ak.	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI

9. MUTASI KEPANGKATAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.18 Data Mutasi Kepangkatan Hakim Tinggi Pengawas

NO	NAMA	PANGKAT /GOL.	T.M.T	PANGKAT/ GOL.	T.M.T
1.	H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum	IV/d	01-04-2015	IV/e	01-04-2019
2.	Benar Sihombing, S.H., M.Hum	IV/d	01-04-2015	IV/e	01-04-2019
3.	Hj. Suryawati, S.H., M.H	IV/d	01-04-2015	IV/e	01-04-2019
4.	Lindi Kusumaningtyas, S.H., M.H	IV/d	01-04-2015	IV/e	01-04-2019
5.	Dr. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum	IV/d	01-04-2015	IV/e	01-04-2019
6.	H. Ujang Abdullah, SH., M.Si	IV/d	01-04-2015	IV/e	01-04-2019
7.	Rudi Widodo, S.H., M.H	IV/d	01-10-2015	IV/e	01-10-2019
8.	H. Achmad Zainullah, S.H., M.H	IV/d	01-10-2015	IV/e	01-10-2019

10. MUTASI KEPANGKATAN HAKIM YUSTISIAL PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.19 Data Mutasi Kepangkatan Hakim Yustisial Pengawas

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangkat/ Gol	T.M.T
1.	Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.Si	III/d	01-04-2015	IV/a	01-04-2019
2.	Endang Lestari, S.H., M.Kn	III/d	01-04-2015	IV/a	01-04-2019
3.	Mario Parakas, S.H., M.H	III/d	01-04-2015	IV/a	01-04-2019
4.	Harika Nova Yeri, S.H., M.H	III/d	01-04-2015	IV/a	01-04-2019
5.	Anisah Shofiawati, S.H	III/d	01-04-2015	IV/a	01-04-2019
6.	Bayuardi, S.H., M.H	III/d	01-04-2015	IV/a	01-04-2019
7.	Muhamad Syaucic, S.H., M.H	III/d	01-04-2015	IV/a	01-04-2019
8.	Drs. H. EkoNurahmat, M.H	IV/c	01-10-2015	IV/d	01-10-2019
9.	Andi Maderumpu, S.H., M.H	III/d	01-10-2015	IV/a	01-10-2019

11. MUTASI KEPANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.20 Data Mutasi Kepangkatan Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangk at/ Gol	T.M.T
1.	Mariana Erka Puteri, SH., MH	III/c	01 - 04 - 2015	III/d	01 - 04 - 2019
2.	Yusuf, SE., Ak., C.A., MA	III/c	01 - 04 - 2017	III/d	01 - 04 - 2019
3.	Lety Puspitosari, SE., Ak., MM	III/c	01 - 10 - 2016	III/d	01 - 04 - 2019
4.	Sahreza Harahap, SE., SH., Ak., C.P.A	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
5.	Sanda Fajelius Hasibuan, SH	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
6.	Davis Rozano Besthari, S.Si	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
7.	Suriyanto, SH	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
8.	Yuan Cynthia Boru Simanjuntak, S.P	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
9.	Betty Kurnianingtyas, S. Kom	III/c	01 - 04 - 2014	III/d	01 - 04 - 2019
10.	Faizal Amir, S.H	III/b	01 - 04 - 2013	III/c	01 - 04 - 2019
11.	Sutrisno, S.H.I	III/b	01 - 04 - 2015	III/c	01 - 04 - 2019

12.	Nur Susana Tifa, S.E	III/b	01 - 04 - 2015	III/c	01 - 04 - 2019
13.	Zullvan Sugiantoro, S.T	III/b	01 - 04 - 2015	III/c	01 - 04 - 2019
14.	Virna Prasamia Nugraha, S.E	III/b	01 - 04 - 2015	III/c	01 - 04 - 2019
15.	Amarildo Rizkia, S.Psi	III/b	01 - 04 - 2015	III/c	01 - 04 - 2019
16.	Rachma Kurniati, S.Psi	III/b	01 - 04 - 2015	III/c	01 - 04 - 2019
17.	Devi Pradifta Army, S.H	III/b	01 - 04 - 2015	III/c	01 - 04 - 2019
18.	Arief Purwoko, S.Kom	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
19.	Tagor Bagus Suprobo, SH	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
20.	Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi., M.H	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
21.	Rizky Setyo Pambudi, S. Kom	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
22.	Dewi Putri Noviandari, S.Kom	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 04 - 2019
23.	Mawardi, S.H	II/c	01 - 04 - 2017	III/a	01 - 04 - 2019
24.	Agustaja Tiyusandy, A.Md., Kom	II/c	01 - 03 - 2015	II/d	01 - 04 - 2019
25.	Mulyanto, SH., MH	III/d	01 - 10 - 2015	IV/a	01 - 10 - 2019
26.	Ferri Taufik Ferdiansyah, SE., Ak., C.A., M.Ak	III/d	01 - 10 - 2017	IV/a	01 - 10 - 2019
27.	Rezky Azhari, S.Psi	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 10 - 2019
28.	Syarifullah M. Nur, S. Kom	III/a	01 - 03 - 2015	III/b	01 - 10 - 2019

12. DATA HAKIM TINGGI PENGAWASAN YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2019, SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.21 Data Hakim Tinggi Pengawasan Yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala Pada Tahun 2019

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	H. Ujang Abdullah, SH., M.Si	30 Tahun	01 - 03 - 2019
2.	Surya Perdamaian, SH	32 Tahun	01 - 12 - 2019

13. DATA HAKIM YUSTISIAL YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2019, SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.22 Data Hakim Yustisial Yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala Pada Tahun 2019

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	H. Sunoto, M.Kn	16 Tahun	01 – 12 - 2019
2.	Harosman Boris Ivan, S.H	16 Tahun	01 – 12 - 2019
3.	Dr. H. Suprandriyo, SH., M.H	16 Tahun	01 – 12 – 2019
4.	Andi Maderumpu, SH., M.H	16 Tahun	01 – 12 – 2019
5.	Abdul Affandi, S.H	16 Tahun	01 – 12 - 2019

14. DATA PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2019, SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.23 Data Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Amarildo Rizkia, S. Psi	08 tahun	01-01-2019
2.	Nursiti, S.E	08 tahun	01-01-2019
3.	Virna Prasamia Nugraha, S.E.	08 tahun	01-01-2019
4.	Devi Pradifta Army, S.H.	08 tahun	01-01-2019
5.	Rachma Kurniati, S. Psi	08 tahun	01-01-2019
6.	Muhammad Huzaiifah, S. Kom	08 tahun	01-01-2019
7.	Nur Susana Tifa, S.E	08 tahun	01-01-2019
8.	Zullvan Sugiantoro, S.T.	08 tahun	01-01-2019
9.	IGNL Sidemen Putra, S.E	14 tahun	01-02-2019
10.	Sri Kamala Dewi, S.H., M.H	28 tahun	01-03-2019
11.	Dra. Any DyahWijayanti	28 tahun	01-03-2019
12.	Yefni Delfitri, S.H., M.H.	28 tahun	01-03-2019

13.	Lucky Permana, S.H., M.H	28 tahun	01-03-2019
14.	Narti Sri Sugiarti, S.E.	08 tahun	01-03-2019
15.	Agustaja Tiyusandy, Amd.Kom.	04 tahun	01-03-2019
16.	Arief Purwoko, S.Kom	04 tahun	01-03-2019
17.	Dewi Putri Noviandari, S.Kom	04 tahun	01-03-2019
18.	Rizky SetyoPambudi, S.Kom	04 tahun	01-03-2019
19.	Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi	04tahun	01-03-2019
20.	Syarifullah M Nur, S.Kom	04 tahun	01-03-2019
21.	Rezky Ashari, S.Psi	04 tahun	01-03-2019
22.	Tagor Bagus Suprobo, S.H	04 tahun	01-03-2019
23.	Sanda Fajelius Hasibuan, S.H	04 tahun	01-03-2019
24.	Davis Rozano Besthari, S.Si.	04 tahun	01-03-2019
25.	Dwi Yandi Febri, S.E., , S.H	04 tahun	01-03-2019
26.	Riswan, S.Kom	04 tahun	01-03-2019
27.	Ridwan AR, S. Komp	04 tahun	01-03-2019
28.	Yuan Cynthia Boru Simanjuntak, S.P	04 tahun	01-03-2019

15. HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, YANG MEMASUKI PURNABAKTI/ Pensiun PADA TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.24 Data Hakim Tinggi Pengawas Dan Pejabat Struktural, yang Memasuki Purnabakti/ Pensiun

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1.	Drs. H. Ahmad Yunus, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-02-2019
2.	Margono, S.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-08-2019
3.	Khudhori Azis, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-10-2019

16. HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, YANG TUTUP USIA PADA TAHUN 2019 DAN MASIH AKTIF DALAM MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN YAITU :

Tabel 3.24 Data Hakim Tinggi Pengawas, yang tutup usia dan masih aktif dalam menjalankan tugas kedinasan

NO	NAMA	JABATAN	WAFAT
1.	Sri Mulyani Yustina, SH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	09-06-2019

17. FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, YANG BERHENTI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YAITU :

Tabel 3.25 Data Fungsional Umum yang berhenti dari Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	JABATAN	WAFAT
1.	Nursiti, SE	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI	01-08-2019

18. PENGHARGAAN SATYA LANCANA 30 TAHUN, 20 TAHUN DAN 10 TAHUN YANG DIPEROLEH OLEH HAKIM TINGGI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL, PEJABAT STRUKTURAL, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.26 Data Penghargaan Satya Lancana 30 Tahun, 20 Tahun dan 10 Tahun

NO	NAMA	JABATAN	SATYA LANCANA
1.	H. Dwiarso Budi Santiarto, SH., M.Hum	Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
2.	Drs. H. Ruslan Abd. Gani, MH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
3.	Drs. H. Husen Riady, SH., MH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
4.	H. Djumain, SH., M.Hum	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
5.	Aswan Nurcahyo, SH., MH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
6.	Surya Perdamaian, SH	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
7.	R. Lucky Permana, SH., MH	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	30 Tahun
8.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	20 Tahun
9.	Dra. Yekti Handayani, SH.,	Kepala Sub Bagian Tata	20 Tahun

	M.Si	Usaha Inspektur Wilayah III pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	
10.	Wiwi Ismiyati, SH., MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektur Wilayah II pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	20 Tahun
11.	Mulyanto, SH., MH	Kepala Sub Bagian Perberhentian dan Pensiun pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	20 Tahun
12.	Sri Widayanti, S., MH	Kepala Sub Bagian Mutasi pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	20 Tahun
13.	Dra. Siti Zainab., MM	Auditor Kepegawaian Madya pada Badan Pengawasan MARI	20 Tahun
14.	Radityo Baskoro, SH., M.Kn	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
15.	Widyatinsri Kuncoro yakti, SH., MH	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
16.	Muhammad Adzkiya, SE., M.Acc., C.A	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
17.	Mochtar Luthfi, SH., MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektur Wilayah IV pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
18.	Zelfikri Oktiva Lubis, ST	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Pembendaharaan pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
19.	Lety Puspitosari, SE., Ak., MM	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
20.	Yugus Dwi Prasetyo, SE	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
21.	Hendra Basry, SE., M.Ak	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
22.	Hendra Ramadani, S.Kom., MM	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
23.	Faizal Amir, SH	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
24.	Dwi Wulan Indriani, S.Psi	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
25.	Sutikno, S. Kom	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
26.	Jhon Richo, S.Psi., MM	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan	10 Tahun

		Pengawasan MARI	
27.	Dwi Era Wahyuni, S.Psi., MM	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
28.	Narti Sri Sugiarti, SE	Fungsional Umum pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun

19. SDM PEJABAT/HAKIM TINGGI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN, PUSTAKAWAN, ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER, ARSIPARIS, PEJABAT STURKTURAL SERTA FUNGSIONAL UMUM YANG MENGIKUTI DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

Tabel 3.27 Data Diklat, Bimtek dan Sosialisasi

NO	NAMA BIMTEK	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA	TUJUAN
1	Pelatihan dan Bimtek Aplikasi SIWAS VERSI 3.0 DAN E-Monitoring Reguler	20 orang	EU-UNDP SUSTAIN	Peningkatan Kompetensi SDM
2	Sosialisasi Kendali Mutu dan Telaah Sejawat	130 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
3	Sosialisasi Evaluasi SKP	120 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
4	Sosialisasi E-LHKPN	168 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
5	Sosialisasi SIWAS Versi 3	121 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
6	Sosialisasi Review Angka Dasar Pagu Indikatif 2020	2 orang	Kementrian Keuangan RI	Peningkatan Kompetensi SDM
7	Diklat Bendahara Penerimaan	2 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
8	Diklat Manajemen	2 orang	Badan Litbang Diklat	Peningkatan

	ASN (Aparatur Sipil Negara)		Hukum dan Peradilan MARI	Kompetensi SDM
9	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	3 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
10	Diklat Keprotokolan Tingkat Manajerial	2 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
11	Diklat Penjejanan Auditor Madya secara E-Learning	2 orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
12	Diklat Substantif Manajemen Resiko	30 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
13	Sosialisasi Pokok – Pokok Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019	2 orang	Kementrian Keuangan RI	Peningkatan Kompetensi SDM
14	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
15	Pelatihan Audit Forensik dan Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	2 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
16	Diklat Keprotokolan Tingkat Manajerial Tahun 2019	1 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
17	Sosialisasi Sistem Pelaporan Triwulan Aksi PK Tahun 2019-2020	2 Orang	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
18	Sosialisasi Aplikasi e-kinerja	2 Orang	Sekretaris MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
19	Bimbingan Teknis	6 Orang	Badan Urusan	Peningkatan

	untuk para Counterpart Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Administrasi MARI	Kompetensi SDM
20	Diklatpim Tingkat IV Angkatan VIII dan IX	2 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
21	Pembinaan Teknis tata Cara perberhentian dan pension pegawai Mahkamah Agung RI	3 Orang	Badan Urusan Administrasi MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
22	Bimtek Teknis Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online dan Sharing Session	4 Orang	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
23	Pelatihan Penilaian Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan (PIPK)	2 Orang	Litbang Diklat Kumdil MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
24	Diklat Fungsional Peningkatan Arsiparis Katagori Keahlian Angkatan III Tahun 2019	1 Orang	Arsip Nasional	Peningkatan Kompetensi SDM
25	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Pengawasan MARI	153 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
26	Sosialisasi Peraturan Cuti, Standar Kompetensi & SIKEP Versi 3.0	55 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
27	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	1 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM

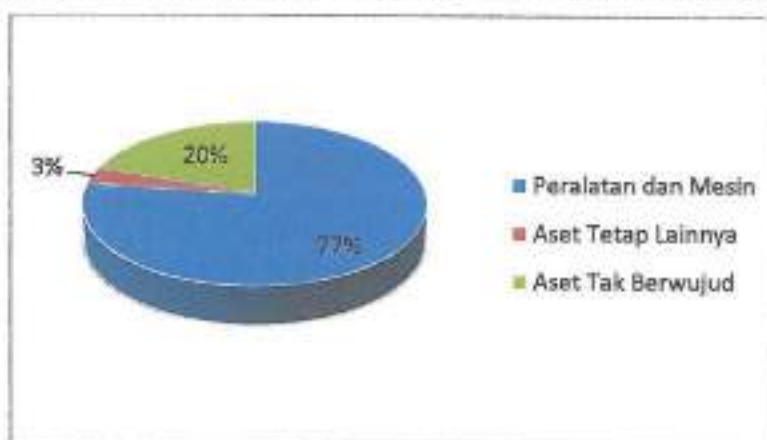
28	Pelatihan Mobile Progaming	7 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
29	Bimtek Manajemen Arsip Inaktif dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)	1 Orang	BUA MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
30	Pelatihan Machine Learning	6 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 dikelompokkan :

➤ 1880 unit peralatan dan mesin	Rp. 12.719.654.176
➤ 2.290 buah aset tetap lainnya	Rp. 535.403.685
➤ 12 unit aset tak berwujud	Rp. 3.254.333.180
Total pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 16.509.391.041

Grafik 3.12 Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan



Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada :

a) Perolehan Sarana dan Prasarana

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2019, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan DIPA tahun 2019

1) Pembelian

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2019 adalah 90 Unit dengan Total Rp 424.433.300 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.28 Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	Rak Besi	1	1.198.000
2.	Filling cabinet besi	42	102.043.200
3.	Alat penghancur Kertas	1	13.230.000
4.	Mesin Absensi	1	2.058.000
5.	Meja Resepsionis	1	80.025.500
6.	Handy Cam	1	30.650.000
7.	Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	2.842.000
8.	P.C Unit	1	9.225.000
9.	Lap Top	7	50.642.000
10.	Personal Komputer Lainnya	1	17.639.600
11.	Printer (peralatan personal komputer)	28	61.380.000
12.	Scanner (peralatan personal komputer)	5	53.500.000
	TOTAL		424.433.300

2) Hibah.

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang berasal dari Hibah Masuk pada tahun 2019 berupa pengembangan aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) yang telah disetujui untuk dilakukan pencatatan pendapatan Hibah dari KPPN adalah sebesar Rp 629.749.215 (enam ratus duapuluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan Persetujuan Pencatatan dari KPPN Nomor 2019175663136001 tanggal 03 Desember 2019.

b) Pemeliharaan

Sarana dan prasarana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sebagian besar hasil Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari DIPA Badan Pengawasan sendiri. Badan Pengawasan memiliki 1926 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

Badan Pengawasan memiliki 15 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

1) Pemeliharaan Inventaris Kantor

Pemeliharaan dan perawatan telah dilakukan terhadap P. C Unit, Printer, Laptop dan Mesin Penghancur kertas.

2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas pada Badan Pengawasan tahun 2019, telah dilakukan pada 4 unit station wagon. Dimana kendaraan dinas tersebut melekat ke jabatan masing-masing pejabat eselon 3.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Perpanjangan STNK, Pengisian BBM, Penggantian sparepart, Service AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, sporing & Balancing dan Pergantian ban.

3) Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Untuk menunjang operasional perkantoran, disediakan 6 unit station wagon, 1 unit Micro Bus dan 4 unit sepeda motor.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Perpanjangan STNK, Pengisian BBM, Penggantian sparepart, Service AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, sporing & Balancing dan Pergantian ban.

c) **Barang Rusak Berat**

Sampai dengan 31 Desember 2019, tercatat ada 46 Buah Barang Milik Negara (BMN) yang rusak berat dan sedang diusulkan penghapusannya, antara lain 2 buah mesin absensi, 17 buah unit power supply (UPS), 3 buah Handy Talky (HT), 1 buah P.C Unit, 5 buah laptop, dan 18 buah printer.

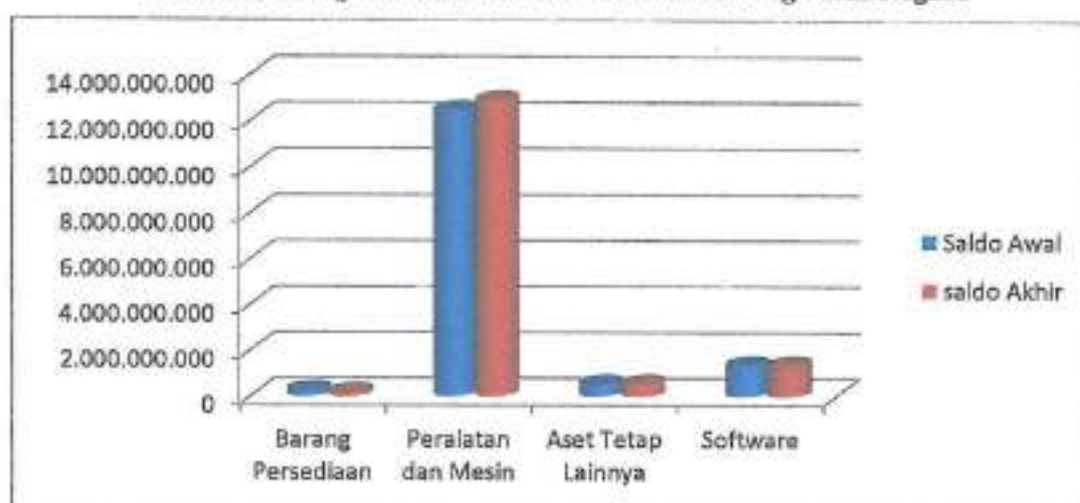
d) **Barang Persediaan**

Saldo persediaan pada Badan Pengawasan per 31 Desember 2019 sebesar Rp108.628.917 (*seratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah.*), jumlah tersebut terdiri dari:

- saldo awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp265.932.132 (*dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*)
- total pembelian persediaan selama Tahun 2019 sebesar Rp466.837.560 (*empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah*)
- total distribusi sebesar Rp647.328.848 (*enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah.*)

Berdasarkan data diatas, Posisi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI T.A 2019 dapat terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.13 Pengelola Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara



HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

Tujuan dari dilakukannya Opname Fisik Barang Persediaan untuk memastikan kesamaan antara data di Aplikasi Persediaan dengan jumlah barang yang riil, yang rinciannya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang				Kondisi Barang	
			Menurut Laporan persediaan		Hasil cek Fisik		Baik	Utang
		1511						
	ALAT TULIS	1810901000						
1	Ballpoint Fester	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
2	Pulpan Gel (Unibal)	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
3	Pensil 2B	000003	32	Buah	32	Buah	Baik	-
4	Spidol Marker Biru	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
5	Spidol Boss (warna Warna)	000005	23	Buah	23	Buah	Baik	-
6	Spidol Whiteboard	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
7	Pulpan Fester Tutup (L&O)	000007	49	Buah	49	Buah	Baik	-
8	Buku Spertol	000008	0	Buku	0	Buku	-	-
9	Spidol Kecil Warna Wonal	000009	3	Buah	3	Buah	Baik	-
10	Staples V3 Ballpoint	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
11	Unibal Bow	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
12	Ordiner Gunung 401	000012	11	Buah	11	Buah	Baik	-
13	Ordiner Gunung 402	000013	21	Buah	21	Buah	Baik	-
14	Ball Point Signa	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
15	Pulpan Kenko	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
16	Pulpan Joyko Gel warna Biru	000016	122	Buah	122	Buah	Baik	-

27	17	Pulpen Jayko Gel warna Hitam	000017	69	Buah	69	Buah	Baik	-
28	18	Batas ABC besar	000018	0	Set	0	Set	-	-
29	19	Balpoint Bakker	000019	27	Buah	27	Buah	Baik	-
30	20	Pulpen Unibal Gelcolor	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
31	21	Map merah Logo	000021	547	Lembar	547	Lembar	Baik	-
32	22	Map kuning Logo	000022	888	Lembar	1100	Lembar	Baik	-
33	23	Map hijau Logo	000023	810	Lembar	810	Lembar	Baik	-
34	24	Map biru logo	000024	960	Lembar	960	Lembar	Baik	-
35	25	Map orange logo	000025	600	Lembar	600	Lembar	Baik	-
36	26	Pensil HB	000026	0	Buah	0	Buah	-	-
37	27	Pulpen Karho Gel Hitam	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
38	28	Balpoint CB Fastar	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
39	29	Pensil mekanik rotiring	000029	16	Buah	16	Buah	Baik	-
40	30	isi pensil rotiring 0,5	000030	20	Pad	20	Pad	Baik	-
41	31	Joyko pen brand	000031	5	Buah	5	Buah	Baik	-
42	32	Balpoint Pronoxi	000032	0	Buah	0	Buah	-	-
43	33	Pulpen fastar FB	000033	0	Buah	0	Buah	-	-
44	34	Pulpen fastar EC 8	000034	0	Buah	0	Buah	-	-
45	35	Pulpen Scotch Magic	000035	0	Buah	0	Buah	-	-
46	36	Balpoint fastar CB	000036	12	Buah	12	Buah	Baik	-
47	37	Pulpen Hero 924	000037	0	Buah	0	Buah	-	-
48	38	Spical Permana	000038	12	Buah	12	Buah	Baik	-
49	39	Pulpen A warna	000039	28	Buah	28	Buah	Baik	-
50	40	Pulpen pastel polartitan	000040	0	Buah	0	Buah	-	-
51	41	Snowman VS Balpoint	000041	55	Buah	55	Buah	Baik	-
52	42	Pulpen penghapus	000042	8	Buah	8	Buah	Baik	-
53		TINTA TULIS, TINTA STEMPEL	1810991002			0			
54	43	Stempel Perma	000043	0	Buah	0	Buah	-	-
55	44	Stempel Colop	000044	0	Buah	0	Buah	-	-
56	45	Tinta Colop	000045	14	Buah	14	Buah	Baik	-
57	46	Tinta Hero	000046	0	Botal	0	Botal	-	-
58	47	isi pulpen pastel	000047	0	Botal	0	Botal	-	-
59		PENjepit KERTAS	1810991003			0			
60	48	Paper Clip	000048	0	Kotak	0	Kotak	-	-
61	49	Binder Clips 107	000049	35	Kotak	35	Kotak	Baik	-
62	50	Binder Clips 155	000050	13	Kotak	13	Kotak	Baik	-
63	51	Klip	000051	0	Kotak	0	Kotak	-	-
64	52	Binder Clip 133	000052	29	Kotak	29	Kotak	Baik	-
65	53	Binder Clip 100	000053	0	Kotak	0	Kotak	-	-
66	54	Binder Clip No 260	000054	31	Kotak	31	Kotak	Baik	-
67	55	Binder Clip 200	000055	14	Kotak	14	Kotak	Baik	-
68	56	Paper Clip Warna	000056	50	Kotak	50	Kotak	Baik	-
69	57	Push Pin	000057	8	Kotak	8	Kotak	Baik	-
70	58	Pembolong Kertas	000058	13	Buah	13	Buah	Baik	-
71	59	Acco besi	000059	979	Set	979	Set	Baik	-
72	60	Stand book	000060	0	Buah	0	Buah	-	-
73	61	Binder Clip 105	000061	0	Kotak	0	Kotak	-	-
74	62	Spiral Plastik UK 1/4"	000062	0	Buah	0	Buah	-	-
75	63	Spiral Plastik UK 5/16"	000063	0	Buah	0	Buah	-	-
76	64	Spiral Plastik UK 3/8"	000064	0	Buah	0	Buah	-	-
77	65	Spiral Plastik UK 7/16"	000065	0	Buah	0	Buah	-	-
78	66	Spiral Plastik UK 1/2"	000066	0	Buah	0	Buah	-	-
79	67	Spiral Plastik UK 9/16"	000067	0	Buah	0	Buah	-	-
80	68	Spiral Plastik UK 5/8"	000068	0	Buah	0	Buah	-	-
81	69	Spiral Plastik UK 3/4"	000069	0	Buah	0	Buah	-	-
82	70	Spiral Plastik UK 1"	000070	0	Buah	0	Buah	-	-
83	71	Spiral Plastik UK 1 1/4"	000071	0	Buah	0	Buah	-	-
84	72	Spiral Plastik UK 1 1/8"	000072	0	Buah	0	Buah	-	-
85	73	Spiral Plastik UK 1 1/2"	000073	0	Buah	0	Buah	-	-
86	74	Spiral Plastik UK 1 3/4"	000074	0	Buah	0	Buah	-	-
87	75	Spiral Plastik UK 2"	000075	0	Buah	0	Buah	-	-
88		PENGHAPUS/KORREKTOR	1810991005			0			
89	76	Penghapus Mesin Ketik 3 BM	000076	0	Buah	0	Buah	-	-
90	77	Penghapus Pensil	000077	32	Buah	32	Buah	Baik	-
91	78	Tip Ex Pensil	000078	7	Buah	7	Buah	Baik	-
92	79	Penghapus Mesin Ketik	000079	0	Buah	0	Buah	-	-
93	80	Penghapusan pulpen	000080	0	Buah	0	Buah	-	-
94	81	Penghapusan whiteboard	000081	3	Buah	3	Buah	Baik	-
95	82	Sabblo wing boss	000082	17	Buah	24	Buah	Baik	-
96	83	Tip Ex Correction	000083	0	Buah	0	Buah	-	-
97		BUKU TULIS	1810991006			0			
98	84	Buku Register Besar	000084	0	Buku	0	Buku	-	-
99	85	Buku Register sedang	000085	0	Buku	0	Buku	-	-
100	86	Buku Register Kecil	000086	0	Buku	0	Buku	-	-
101	87	Buku Register Panjang	000087	0	Buku	0	Buku	-	-
102	88	Buku Pengawasan Kecil	000088	0	Buku	0	Buku	-	-
103	89	Buku Tanda Terima UHP	000089	52	Buku	52	Buku	Baik	-
104	90	Buku Box Permintaan ATK	000090	20	Buku	20	Buku	Baik	-
105	91	Dokumen Pengaduan	000091	0	Set	0	Set	-	-
106	92	Standard Buku INWAK	000092	0	Buku	0	Buku	-	-
107	93	Buku Agenda Foto 300	000093	22	Buku	22	Buku	Baik	-
108	94	Buku Agenda Foto 200	000094	18	Buku	18	Buku	Baik	-
109	95	Buku Agenda Foto 100	000095	19	Buku	19	Buku	Baik	-
110	96	Formulir hasil penelaahan	000096	23	Buku	23	Buku	Baik	-
111	97	Tanda terima surat	000097	12	Buku	12	Buku	Baik	-
112	98	Peminjaman inventaris	000098	4	Buku	4	Buku	Baik	-
113	99	Noti box	000099	0	Buku	0	Buku	-	-
114	100	Rvltama	000100	12	Buku	12	Buku	Baik	-

114	101	Buku Daftar Tema	000018	30	Buku	30	Buku	Baik	-
116		ORDER BAHAN MAP	1010901009			0			
117	103	Stap Map	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
118	103	Map Selfhector	000002	0	Lembar	0	Lembar	-	-
119	104	Driver	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
120	105	Box File	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
121	106	Map LHP	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
122	107	Map Biasa	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
123	108	Radio Arch File	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
124	109	Map Tulang Radaa Pengawasan	000008	0	Lembar	0	Lembar	-	-
125	110	Map Biasa	000009	0	Lembar	0	Lembar	-	-
126	111	Box file pekaai tulup	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
127	112	Spring file plastik	000011	281	Buah	281	Buah	Baik	-
128	113	Box file bantex	000012	55	Buah	55	Buah	Baik	-
129	114	Clear holder P1	000013	10	Buah	10	Buah	Baik	-
130	115	Order kertas folio	000014	100	Buah	100	Buah	Baik	-
131	116	Basis file plastik	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
132	117	Dolaman Koper Sami Kuli	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
133	118	Notepad Holder Kuli	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
134	119	Map Plastik L	000019	38	Lembar	38	Lembar	Baik	-
135	120	Map Ageo Pengawasan	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
136		PENGGAAS	1010901007			0			
137	121	Ponggaris Besi 30 CM	000001	7	Buah	7	Buah	Baik	-
138	122	Ponggaris plastik 30 CM	000002	3	Buah	3	Buah	Baik	-
139	123	Ponggaris Besi 50 CM	000003	11	Buah	11	Buah	Baik	-
140		CUTTER	1010901008			0			
141	124	Gunting Besar/Reci/Sedang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
142	125	Cutter Besar (L-100)	000002	3	Buah	3	Buah	Baik	-
143	126	Gunting 838 (sedang)	000003	19	Buah	19	Buah	Baik	-
144	127	Gunting 848 (besar)	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
145	128	Cutter A-300	000005	25	Buah	25	Buah	Baik	-
146	129	Serutan pensil	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
147	130	isi cutter A-300	000007	21	Pad	21	Pad	Baik	-
148	131	Serutan meja pensil	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
149		PITA MESIN KETIK	1010901009			0			
150	132	Pita Mesin Ketik IBM	000001	12	Buah	12	Buah	Baik	-
151	133	Pita Mesin Ketik Monnal	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
152	134	Pita mesin ketik Royal	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
153		ALAT PEREKAT	1010901010			0			
154	135	Lem kertas	000001	0	Botal	0	Botal	-	-
155	136	Lem Indralol	000002	0	Botal	0	Botal	-	-
156	137	Lem Oka	000003	7	Botal	7	Botal	Baik	-
157	138	Double Sc tape	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
158	139	Stapel Solatip	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
159	140	Lem kanvas	000007	0	Kaleng	0	Kaleng	-	-
160	141	Lem jayko cair	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
161	142	Lem collar fixed	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
162	143	Lem glue stick	000010	45	Buah	45	Buah	Baik	-
163	144	Dispenser tape	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
164	145	Page marker assorted 3M	000012	0	Pad	0	Pad	-	-
165	146	Post it sign here 3M	000013	20	Pad	20	Pad	Baik	-
166	147	Scotch tape magic	000014	5	Pad	5	Pad	Baik	-
167	148	Post it note tape flag 3M	000015	30	Pad	30	Pad	Baik	-
168	149	Post it tape flag warna warna	000016	10	pad	10	pad	Baik	-
169	150	Post it 854 Warna	000017	0	Pad	0	Pad	-	-
170	151	Double selotip 3M	000018	10	Pad	10	Pad	Baik	-
171		STADLER HD	1010901011			0			
172	152	Stapler HD 10 Max	000001	26	Buah	26	Buah	Baik	-
173	153	Stapler HD 50 Max	000002	25	Buah	25	Buah	Baik	-
174	154	Stapler Remover	000003	4	Buah	4	Buah	Baik	-
175		STAPLES	1010901011						
176	155	Staples HD 12 H/24	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
177		ISI STAPLES	1010901012						
178	156	isi staples 1215 Max	000001	28	Kotak	28	Kotak	Baik	-
179	157	isi staples 1210 Max	000002	19	Kotak	19	Kotak	Baik	-
180		BARANG CETAKAN	1010901010						
181	158	Buku Petan Abif hakim dlm peralita Perdata	000001	0	Buku	0	Buku	-	-
182	159	Buku Pemakaian Peradilan	000005	0	Buku	0	Buku	-	-
183		ALAT TULUS KANTOR LAINNYA	1010901999						
184	160	Staplo Bons	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
185	161	isi Stapler No. 5-1 M	000002	100	Kotak	100	Kotak	Baik	-
186	162	isi Staples No. 10-1M	000003	108	Kotak	108	Kotak	Baik	-
187	163	isi Staples No. 5/14"	000004	18	Kotak	18	Kotak	Baik	-
188	164	isi staples No 5/8"	000005	21	Kotak	21	Kotak	Baik	-
189	165	isi Cutter Besar	000006	89	Kotak	89	Kotak	Baik	-
190	166	Kalkulator Casio	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
191	167	C/Keyboard Plastik	000008	5	Buah	5	Buah	Baik	-
192	168	Paper Tray	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
193	169	Desk Organizer	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
194	170	One bag eagle 305	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
195	171	Papan whiteboard	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
196	172	Pembolong No. 858 Koko	000013	4	Buah	4	Buah	Baik	-
197	173	Papan Whiteboard 45x60	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
198	174	Joyko numbering	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
199	175	Tax Rakor	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
200	176	Kanting Pensil	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
201		Keyboard Plastik	1010902001						
202	177	Kertas HVS70 gram A4	000001	136	Sim	136	Sim	Baik	-

203	178	Kertas HVS 70 gram F4	000003	16	Rim	16	Rim	Baik	-
204	179	Kertas HVS 80 gram A4	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
205	180	Kertas HVS A3	000004	1	Rim	1	Rim	Baik	-
206		BERBAGAI KERTAS	1010902002						
207	181	Kertas Fax	000001	3	Roll	3	Roll	Baik	-
208	182	Kertas Lembar Disposal	000002	0	Buku	0	Buku	-	-
209	183	Kertas Memo Roll	000003	17	Buku	17	Buku	Baik	-
210	184	Kertas memo besar	000004	7	Buku	7	Buku	Baik	-
211	185	Kertas Persediaan	000005	300	Lembar	300	Lembar	Baik	-
212	186	Kertas Berobot	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
213	187	Paper 8054	000007	1	Roll	1	Roll	Baik	-
214	188	Label T/1 A4	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
215	189	Bok anis/kardes	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
216	190	Kertas label TermJerry	000010	297	Pak	297	Pak	Baik	-
217	191	Glossy photo paper	000011	27	Pak	27	Pak	Baik	-
218	192	Glossy photo sticker	000012	6	Pak	6	Pak	Baik	-
219	193	Tisu Kotak	000013	0	Kotak	0	Kotak	Baik	-
220	194	Tisu Roll	000014	0	Roll	0	Roll	Baik	-
221		KERTAS COVER	1010902003						
222	195	Sampul Kertas Belahkang	000001	0	Lembar	0	Lembar	-	-
223	196	Kertas Film F4	000002	0	Lembar	0	Lembar	-	-
224	197	Kertas Cover	000003	378	Lembar	378	Lembar	Baik	-
225	198	Kertas Cover F4	000004	0	Lembar	0	Lembar	-	-
226	199	Kertas Cover A4	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
227		AMPLOP	1010902004						
228	200	Amplop Dinas kecil	000001	1305	Lembar	1305	Lembar	Baik	-
229	201	Amplop Putih No.100	000002	67	Pak	67	Pak	Baik	-
230	202	Amplop Putih No.90	000003	12	Pak	12	Pak	Baik	-
231	203	Amplop dinas besar	000004	176	Lembar	176	Lembar	Baik	-
232	204	Amplop Dinas bermelanga	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
233		KOP SURAT	1010902005						
234	205	Kop Garuda Tengah Polos	000001	1	Rim	1	Rim	Baik	-
235	206	Kertas Kop Surat Tugos	000002	0	Rim	0	Rim	-	-
236	207	Kertas Kop Surat	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
237	208	Lembar disposal	000004	0	Rim	0	Rim	-	-
238	209	Kop Surat MARI	000005	26	Rim	26	Rim	Baik	-
239	210	Kop ST Umbul	000006	31	Rim	31	Rim	Baik	-
240	211	Kop logo Garuda convercor	000007	4	Rim	4	Rim	Baik	-
241	212	Kop Garuda convercor	000008	1	Rim	1	Rim	Baik	-
242		KERTAS DAN COVER LAINNYA	1010902006						
243	213	Kertas pembatas A4	000001	0	Rim	0	Rim	-	-
244	214	Sampul plastik	000002	928	Lembar	928	Lembar	Baik	-
245	215	Pembatas kertas warna-warni	000003	30	Rim	30	Rim	Baik	-
246		TINTA CETAK	1010909002						
247	216	Tinta Print Laser Jet 7560A	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
248	217	Tinta Print Laser Jet 7561A	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
249	218	Tinta Print Laser Jet 7562A	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
250	219	Tinta Print Laser Jet 7563A	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
251	220	Tinta Stempel	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
252	221	Tinta Canon 36	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
253	222	Tinta Canon 35	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
254	223	Karbon mesin fax	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
255	224	Karbon mesin fax Panasonic	000009	5	Buah	5	Buah	Baik	-
256		PLAT CETAK	1010909003						
257	225	huruf Akrilik	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
258	226	Backdrop	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
259		BAHAN CETAK LAINNYA	1010909004						
260	227	Lakban Hitam Besar	000001	25	Buah	25	Buah	Baik	-
261	228	Bantalan Stempel	000002	7	Buah	7	Buah	Baik	-
262	229	Lakban Kecil	000003	38	Buah	38	Buah	Baik	-
263	230	Lakban Sedang	000004	45	Buah	45	Buah	Baik	-
264	231	Lakban Besing	000005	4	Buah	4	Buah	Baik	-
265	232	Lakban Coldkat	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
266	233	Celotape	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
267	234	Lem Alapan	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
268	235	Gunting Besar	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
270	236	Kertas continuous form 9 1/2x1 PLY	000001	0	Box	0	Box	-	-
271		PITA PRINTER							
272	237	Pita Epson LQ 2190	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
273		TINTA/TONER PRINTER	1010904004						
274	238	Tinta 94 (black)	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
275	239	Tinta 95 (Color)	000002	1	Buah	1	Buah	Baik	-
276	240	Toner HP 12 A	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
277	241	Tinta HP Deskjet 150	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
278	242	Tinta Printer HP Laserjet 2700	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
279	243	Tinta HP Deskjet 796	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
280	244	Tinta Printer Laserjet 7560A	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
281	245	Tinta Printer Laserjet 7561A	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
282	246	Tinta Printer Laserjet 7562A	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
283	247	Tinta Printer Laserjet 7563A	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
284	248	Tinta HP 57	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
285	249	Tinta HP 56	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
286	250	Tinta Canon PWF 3	000013	0	Buah	0	Buah	-	-
287	251	Toner HP 85 A	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
288	252	Tinta Epson L800 888cm	000015	8	Buah	8	Buah	Baik	-
289	253	Tinta HP P9015	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
289	254	Tinta Xerox Phaser 3428	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
290	255	Data Print Hitam (Canon cetes)	000018	0	Buah	0	Buah	-	-

292	256	Tinta Print Warna (canon tetes)	000019	0	Buah	0	Buah	-	-
293	257	Toner HP 12 A Hitam	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
294	258	Toner HP 35 A Hitam	000021	0	Buah	0	Buah	-	-
295	259	Tinta Epson L800 Magenta	000022	4	Buah	4	Buah	Baik	-
296	260	Tinta Epson L800 Yellow	000023	4	Buah	4	Buah	Baik	-
297	261	Tinta Epson L800 Cyan	000024	11	Buah	11	Buah	Baik	-
298	262	Tinta Epson L800 Light Cyan	000025	1	Buah	1	Buah	Baik	-
299	263	Tinta Epson L800 Light Magenta	000026	5	Buah	5	Buah	Baik	-
300	264	Tinta HP 88 (Black)	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
301	265	Tinta Brother Black	000028	3	Buah	3	Buah	Baik	-
302	266	Tinta Brother Cyan	000029	3	Buah	3	Buah	Baik	-
303	267	Tinta Brother Magenta	000030	1	Buah	1	Buah	Baik	-
304	268	Tinta Brother Yellow	000031	1	Buah	1	Buah	Baik	-
305	269	Toner HP 55A	000032	1	Buah	1	Buah	Baik	-
306	270	Toner Xerox warna	000033	0	Buah	0	Buah	-	-
307	271	Toner Xerox Hitam P115W	000034	0	Buah	0	Buah	-	-
308	272	Tinta HP 62 Hitam	000035	2	Buah	2	Buah	Baik	-
309	273	Tinta HP 62 Warna	000036	8	Buah	8	Buah	Baik	-
310		DISKET	1010304005						
311	274	Sony CD RW 700 MB	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
312	275	Sony Recording AFD	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
313	276	DVD Verbatim	000003	0	Keping	0	Keping	-	-
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
315	277	USB 2 GB	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
316	278	Ras disk 4 GB	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
317	279	Flash Disk 2 GB	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
318	280	Flash Disk 8 GB	000004	6	Buah	6	Buah	Baik	-
319	281	Flash disk 32 GB	000005	4	Buah	4	Buah	Baik	-
320	282	USB Hub	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
321	283	Name Tag Flashdisk	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
322		MOUSE							
323	284	Mouse wireless	000001	10	Buah	10	Buah	Baik	-
324		CD/DVD							
325	285	CD Rakor	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
326	286	DVD RW	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
327		BAHAN KOMPUTER LAINNYA	1010304009						
328	287	Kabel Data	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
329	288	Mouse Pad	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
330	289	Kabel Power	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
331	290	Kabel HDMI	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
332	291	Hardisk External	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
333	292	Mouse	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
334	293	Cooler mouse nopenol	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
335			113113						
336		SAPU DAN SIKAT	1010305001						
337	294	Sikat Cuci	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
338	295	Kerucang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
339	296	Sikat Toilet	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
340	297	Sapu Juh	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
341		ALAT-ALAT PEL DAN LAP	1010306001						
342	298	Wiper Lantai	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
343	299	Kain Sorbet	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
344	300	Handuk	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
345	301	Tissue Kotak	000004	0	Kotak	0	Kotak	-	-
346	302	Tissue Roll	000005	0	Roll	0	Roll	-	-
347	303	Kain Pel Berang	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
348	304	Pembilas Lantai Panjang	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
349	305	wiper kaca	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
350		EMBER, SILANG, DAN TEMPAT AIR LAINNYA	1010307001						
351	306	Ember Besar	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
352	307	Ember Sedang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
353	308	Gayung	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
354		KESET DAN TEMPAT SAMPAH	1010308004						
355	309	Karpet Karat	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
356	310	Dasar Cotton Map	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
357	311	Handuk Keset	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
358	312	Tempat Sampahutup	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
359	313	Keser	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
360		ALAT PENGIKAT	1010309008						
361	314	Tali Rami	000001	27	Roll	17	Roll	Baik	-
362	315	Tali Kafia	000002	0	Roll	0	Roll	-	-
363		BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH	1010310008						
364	316	Pewangi Jantal	000001	0	Botol	0	Botol	-	-
365	317	Sabun cuci	000002	0	Pak	0	Pak	-	-
366	318	Powder pembersih	000003	0	Botol	0	Botol	-	-
367	319	Hand Soap	000004	0	Botol	0	Botol	-	-
368	320	Pembersih kaca	000005	0	Botol	0	Botol	-	-
369	321	Pembersih	000006	0	Botol	0	Botol	-	-
370	322	Pembersih lantai	000007	0	Botol	0	Botol	-	-
371	323	ble Amosol	000008	0	Botol	0	Botol	-	-
372	324	Sabun cuci Sanifit Botol	000009	0	Botol	0	Botol	-	-
373	325	Sabun Cuci Sanifit Bross	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
374	326	Handymop	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
375	327	Sabun Mandi	000012	0	Botol	0	Botol	-	-
376	328	Semprot Nyamuk	000013	0	Botol	0	Botol	-	-
377	329	Kampas	000014	0	Pack	0	Pack	-	-
378	330	Pembersih Furniture	000015	0	Pack	0	Pack	-	-
379	331	Karbol	000016	0	Pack	0	Pack	-	-
380	332	ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM	1010310009						

383	333	Nampan	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
387	334	Pisau Buah	000002	0	Lotus	0	Lotus	-	-
388	335	Sendok Garau	000003	0	Lotus	0	Lotus	-	-
384	336	Sendok Sayer	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
385	337	Gelas Kaca Gelas	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
386	338	Piring Sanga	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
389	339	Piring	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
386	340	Mangkuk	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
389	341	Cangkir Sanga	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
390	342	Cangkir Set	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
394	343	Sendok makan	000013	0	Lotus	0	Lotus	-	-
393	344	PENGHARUM RUANGAN	1010094912						
394	345	Kapur Barus	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
394	346	Pewangi gantung	000002	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
395	347	Hy Fresh	000003	0	Botol	0	Botol	-	-
396	348	Mesin Aerosol/Pewangi Glade	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
397	349	Carwash	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
398	350	Toilet Bowl	000006	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
399	351	Mesin pengharum ruangan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
400	352	Pengharum alan meja	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
401	353	Sal Refill Glade	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
402		PERABOT KANTOR LAINNYA	1010094999						
403	354	Spone Cucipiring	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
404	355	Kanebo	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
405	356	Kain kasu	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
406	357	Obeng	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
407	358	Trolly Kecil	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
408	359	Trolly Besar	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
409		KABEL LISTRIK	1010096001						
410	360	Kabel NYM 3x2,5 50 M	000001	0	Roll	0	Roll	-	-
411	361	Kabel Roll	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
412	362	Kabel NYM 3x1,5 50M	000003	0	Roll	0	Roll	-	-
413	363	Kabel NYM 3x2,5 50 M	000004	0	Roll	0	Roll	-	-
414	364	Kabel NYM NY 3x0,75 50M	000005	0	Roll	0	Roll	-	-
415		LAMPU LISTRIK	1010096002						
416	365	Lampu Philips 22 Watt	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
417	366	Lampu Philips 16 Watt	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
418		STOP KONTAK	1010096003						
419	367	Kabel Colokan 5 M	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
420		SAKLAR	1010096004						
421	368	Saklar 4 lubang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
422	369	Saklar 3 lubang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
423	370	Saklar 2 lubang	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
424		Balkon	1010096006						
425	371	Balok	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
426		BATU BATERAI	1010096010						
427	372	Baterai Alkalin (AA)	000001	30	set	30	set	Balk	-
428	373	Batu Baterai Alkalin (AAA)	000002	32	set	32	set	Balk	-
429	374	Battery kotak 9 volt	000003	2	Buah	2	Buah	Balk	-
430		ALAT LISTRIK LAINNYA	1010096009						
431	375	Remah lampu Down light	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
432		ATRIBUT	1010097004						
433	376	Kartu Peserta 5 Tag	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
434		ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	1010099999						
435	377	Buku Agenda Rakor	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
436	378	Nam Tag	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
437	379	Tas Laptop Predator Carriem 14"	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
438	380	Tas Laptop Prodigy Carriem RC 14"	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
439	381	Tas Laptop Lucerne LT - RC Carriem 14"	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
440	382	Tas Laptop Incode Carriem 14"	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
441	383	Tas Pemeriksaan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
442	384	Koper Pemeriksaan Pemeriksaan	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
443	385	Koper Pemeriksaan Pemeriksaan 1	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
444	386	Material 0000	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
445	387	Material 0000	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
446		OBAT CAIR							
447	388	Obat Nyamat	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
448			128128						
449		BARANG PERSEDIAAN	1010010006						
450	389	Tas Sosialisti	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
451	390	Tas Hising Sosialisti	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
452	391	Buku Managemen Pengawasan	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
453	392	Buku Himpunan Peraturan Perundang	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
454	393	Buku Peraturan Peradilan Bayan	000005	0	Buah	0	Buah	-	-

C. Pengelolaan Keuangan

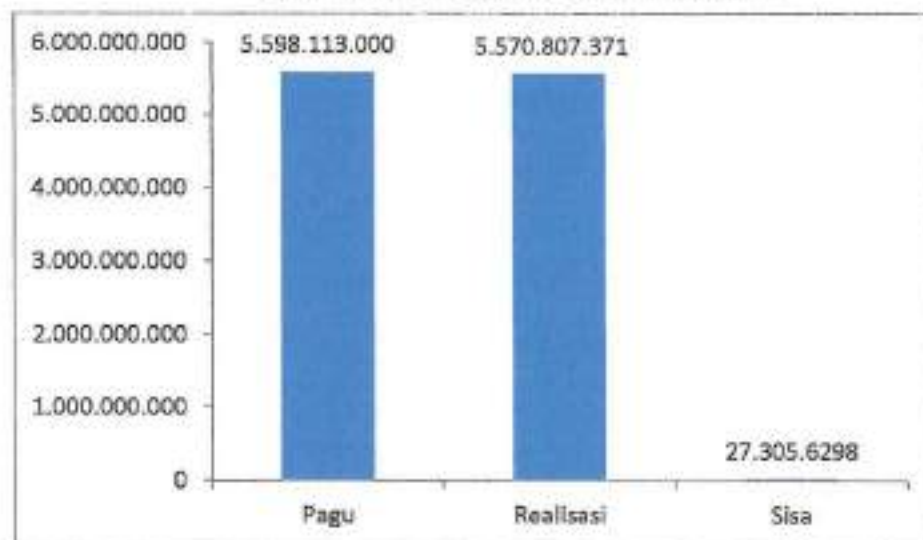
Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2019 Tanggal 5 Desember 2018 dengan jumlah PAGU (REVISI KE-2 tanggal 09 Juli 2019) sebesar Rp. 33.650.412.000,- terdiri dari:

1. BELANJA PEGAWAI

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2019 yaitu:

- a. Pagu** : Rp. 5.598.113.000,-
(lima milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah)
- b. Realisasi** : Rp. 5.570.807.371,- (99,51%)
(lima milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)
- c. Sisa** : Rp. 27.305.629,- (0,49%)
(dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah)

Grafik 3.14 Belanja Pegawai Tahun 2019

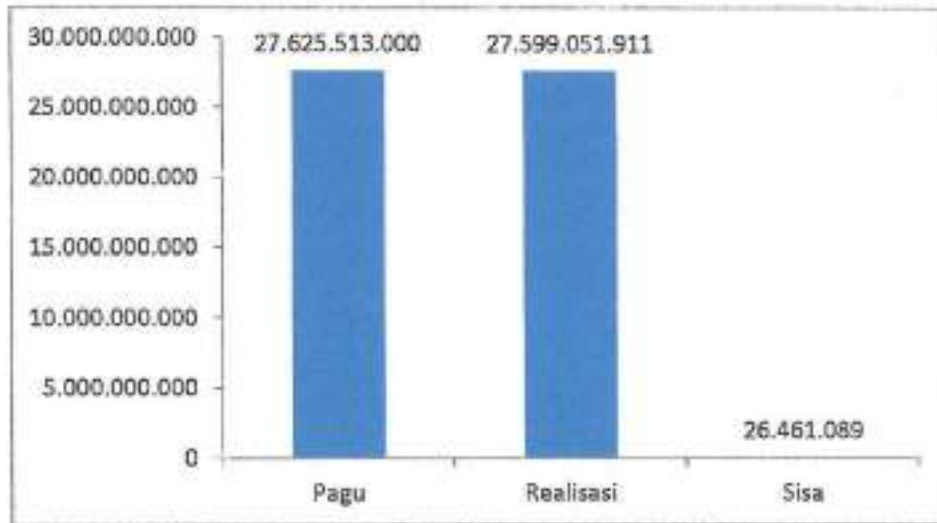


2. BELANJA BARANG

Pengelolaan belanja barang tahun anggaran 2019 yaitu:

- a. Pagu** : Rp. 27.625.513.000,-
(dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu Rupiah)
- b. Realisasi** : Rp. 27.599.051.911,-
(dua puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas Rupiah)
- c. Sisa** : Rp. 26.461.089,- (0,096%)
(dua puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan puluh sembilan Rupiah)

Grafik 3.15 Belanja Barang Tahun 2019

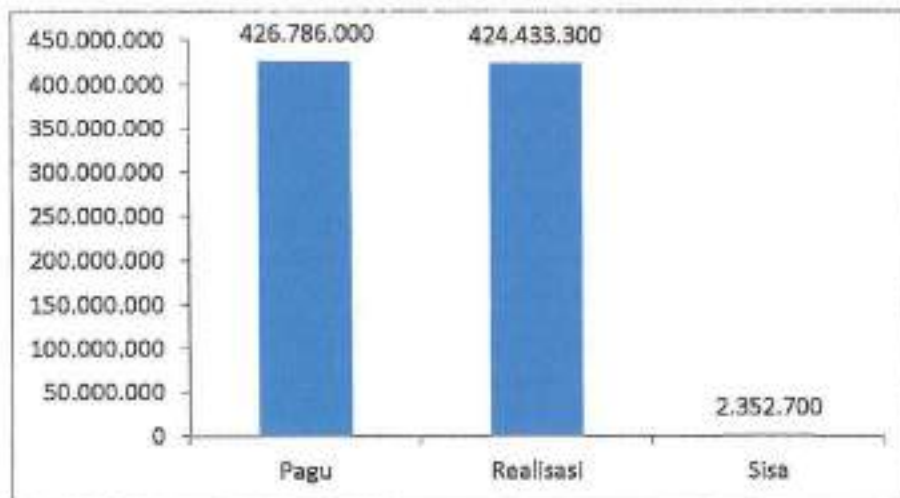


3. BELANJA MODAL

Pengelolaan belanja modal tahun anggaran 2019 yaitu:

- a. Pagu : Rp. 426.786.000,-
(empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- b. Realisasi : Rp. 424.433.300,- (99,44%)
(empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
- c. Sisa : Rp. 2.352.700,- (0,56%)
(dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Grafik 3.16 Belanja Modal Tahun 2019



Tabel 3.29 Data Per Output & Satuan Belanja TA 2019

Sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2019 Tanggal 5 Desember 2018

		Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
Inspektur Wilayah I (1077)	Pemeriksaan Audit Khusus	1.666.704.000	1.666.452.526	251.474
	Pelaksanaan Audit Internal	1.769.742.000	1.769.738.742	3.258
	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	960.639.000	960.637.600	1.400
	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	15.950.000	15.950.000	0
Inspektur Wilayah II (1078)	Pemeriksaan Audit Khusus	1.825.285.000	1.825.282.382	2.618
	Pelaksanaan Audit Internal	1.927.181.000	1.927.177.957	3.043
	Reviu Perencanaan Anggaran	39.350.000	39.350.000	0
	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	861.789.000	861.787.850	1.150
	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	11.550.000	11.550.000	0
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (1079)	Penyusunan Rencana Program	241.116.000	241.077.742	38.258
	Pengelolaan Keuangan	150.346.000	150.316.507	29.493
	Pengelolaan Perbendaharaan	428.264.000	428.260.823	3.177
	Pengelolaan Kepegawaian	1.628.063.000	1.624.027.077	4.035.923
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	391.989.000	391.967.650	21.350
	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	639.384.000	639.298.000	86.000
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	4.729.896.000	4.729.732.736	163.264
	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	149.636.000	148.769.000	867.000
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	277.150.000	275.664.300	1.485.700
	Gaji dan Tunjangan	5.598.113.000	5.570.807.371	27.305.629
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.742.354.000	2.721.523.359	20.830.641

Inspektur Wilayah III (5258)	Pemeriksaan Audit Khusus	1.400.472.000	1.400.390.700	81.300
	Pelaksanaan Audit Internal	1.978.945.000	1.978.797.276	147.724
	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	547.455.000	547.454.175	825
	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	13.100.000	13.100.000	0
Inspektur Wilayah IV (5259)	Pemeriksaan Audit Khusus	1.247.380.000	1.247.368.650	11.350
	Pelaksanaan Audit Internal	1.353.793.000	1.353.044.000	748.600
	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.044.716.000	1.044.715.759	241
	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	10.050.000	10.050.000	0

➤ Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.650.412.000 digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp 5.598.113.000
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp 2.742.354.000
- Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas, pembinaan, tindak lanjut pengaduan dan Reviu RKAKL) sebesar Rp 24.883.159.000
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp 426.786.000

➤ Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Dalam rangka perkembangan penanganan pengaduan setiap tahunnya, maka diperlukan perkembangan personel Badan Pengawasan. Sehingga diperlukan perkembangan alokasi anggaran setiap tahunnya, berikut perkembangan alokasi anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

Tabel 3.30 Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

No	Unit	Tahun Anggaran APBN		
		2017	2018	2019
1	Badan Pengawasan	31.400.000.000	33.944.916.000	33.650.412.000

D. Regulasi Tahun 2019

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Assurance meliputi Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan *Keuangan*, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, *Consulting* dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan *Quality Assurance*

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Dalam menjaga eksistensi tertib administrasi dan kedisiplinan, maka pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan inspeksi mendadak yang meliputi: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Militer I-04 Palembang, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Tinggi Palu, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Cilacap, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Militer I-07 Palembang, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Negeri Kendal, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Pengadilan Negeri Kapanjen, Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Raskasbitung, dan Pengadilan Negeri Kudus.

2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada

pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 97 Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 59 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 27 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker.

3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan upaya untuk menjaga akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, menguji dan mengetahui sejauhmana kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga prinsip ekonomis, efisien ,efektif dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicapai.

Tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 3 satker dan Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 1 satker.





BAB IV PENGAWASAN






A. Program Pembaharuan

1. Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0

Secara keseluruhan para pengguna telah mengimplementasikan dan merasakan manfaat positif dengan adanya aplikasi SIWAS Versi 3.0. Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses penyelesaian penanganan pengaduan perlu adanya perhatian khusus dalam pengembangan, perbaikan dan penambahan fitur pada aplikasi SIWAS Versi 3.0. yang ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan fitur antara lain:

Tabel 4.1 Penyempurnaan Aplikasi Siwas

No	Fitur/Fungsi	Screen Shoot	Keterangan
1	Optimalisasi Fitur Klarifikasi		Versi sebelumnya hanya terdapat fitur input data hasil klarifikasi dan saat ini telah ditambahkan fitur delegasi klarifikasi melalui aplikasi SIWAS.
2	Integrasi sistem dengan aplikasi persuratan		Penambahan fitur lacak pengaduan untuk petugas meja pengaduan Badan Pengawasan. Data yang disajikan adalah hasil integrasi sistem antara aplikasi SIWAS dan aplikasi Persuratan Badan Pengawasan.
3	Fitur Laporan tindak lanjut pengaduan pada akun Inspektur Wilayah		Menampilkan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan jenis tindak lanjut. Laporan ditampilkan dalam bentuk tabular dan grafik.
4	Opsi Terlapor diluar aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya		Digunakan ketika terlapor yang diadukan bukan aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

5	fitur <i>auto save</i> pada telaah, pemeriksaan dan LHP		Fitur <i>auto save</i> dijalankan setiap 3 menit. Data otomatis tersimpan.
6	Penambahan jenis sumber pengaduan dari media massa/medsos		
7	Fitur gabung pengaduan pada Irwil / TU Irwil		Fitur gabung pengaduan digunakan untuk menggabungkan pengaduan yang memiliki kesamaan sehingga diakumulasi menjadi 1 pengaduan dan meminimalisir duplikasi pengaduan
8	Fitur Unggah dokumen pada jawab surat		Digunakan untuk mengunggah dokumen jawaban melalui surat kepada pelapor.
9	Fitur Unggah dokumen jawaban konfirmasi dan klarifikasi dari dari dokumen manual.		Digunakan petugas Tata Usaha Umum Badan Pengawasan untuk melakukan input data dan unggah dokumen jawaban konfirmasi dan klarifikasi yang dikirimkan ke Badan Pengawasan

10	Perubahan pada <i>dashboard</i> meja pengaduan dan Irwil		Data disajikan dalam 3 bagian: 1. Data jumlah pengaduan pada tahun berjalan 2. Data penanganan pengaduan berdasarkan tahun yang di pilih 3. Notifikasi penugasan
----	--	--	---

2. Penerapan *Pilot Project* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan MARI telah menetapkan 7 (tujuh) Pengadilan Negeri sebagai *pilot project* untuk mencanangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan standar internasional SNI ISO 37001 : 2016 sebagai upaya pencegahan suap dan korupsi, yang penyelenggaraannya dibiayai oleh USAID Cegah. Sistem ini dirancang bagi pengadilan untuk menaati peraturan perundang-undangan, dengan kemampuan mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) tindak pidana suap berdasarkan 6 (enam) prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan *review/evaluasi*. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check, dan Act*.

Tahapan penerapan SNI ISO 37001 pada pengadilan yang menjadi *piloting* berupa: (1) Persiapan yang meliputi *training* dan *gap analysis*; (2) Pengembangan Sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi; (3) Implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem; (4) *Review* Sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi; dan (5) Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Setiap pengadilan negeri *piloting* telah melakukan *bribery assessment* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut.

Penilaian didasarkan pada 43 klausul yang menjadi kriteria SMAP pada lembaga peradilan. Hasilnya, pengadilan negeri yang menjadi *pilot project* berhasil meraih sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Ketujuh pengadilan negeri yang meraih sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kelas I.A Khusus).
- 2) Pengadilan Negeri Makassar (Kelas I.A Khusus).
- 3) Pengadilan Negeri Yogyakarta (Kelas I.A).
- 4) Pengadilan Negeri Denpasar (Kelas I.A).
- 5) Pengadilan Negeri Padang (Kelas I.A).
- 6) Pengadilan Negeri Ternate (Kelas I.B).
- 7) Pengadilan Negeri Pangkal Pinang (Kelas I.B).

Pada tanggal 30 Desember 2019 Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menyerahkan sertifikasi SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyyuapanan kepada 7 (tujuh) pengadilan Negeri tersebut. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan penghargaan kepada 7 (tujuh) pengadilan negeri yang meraih sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP), yang menjadi bukti lembaga peradilan terus berbenah meraih kepercayaan publik. Badan Pengawasan memproyeksikan sistem ini akan dikembangkan secara mandiri di pengadilan-pengadilan lainnya untuk mencegah praktek-praktek tidak terpuji yang dapat menurunkan wibawa lembaga peradilan.



Gambar 4.1 Penerimaan Sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyyuapan (SMAP) kepada 7 (tujuh) Pengadilan Negeri

B. Pengelolaan Sistem Pengawasan

1. Penanganan Pengaduan

Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.952 pengaduan, dengan rincian:

Tabel 4.2.1 Jumlah Pengaduan Tahun 2019

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.942
2	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	211
3	Pengaduan Aplikasi Siwas	781
4	Pengaduan dari Satgas	18
Jumlah		2.952

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.2 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2019

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1	Masih Proses Penyelesaian		996
2	Selesai diproses		1956
	a. Diperiksa Tim Bawas	290	
	b. Delegasi ke Tingkat Banding	52	
	c. Delegasi ke Tingkat Pertama	779	
	d. Memorandum / Delegasi Internal	35	
	e. Dijawab Surat	785	
	f. Diarsipkan	15	
Jumlah		1.956	2.952

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- 2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- 3) Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.

- 4) Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan.
- 2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak *fair*), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.
- 3) Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- 4) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- 6) Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- 7) Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.
- 8) Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- 9) Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:

- 1) Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan, disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum.
- 2) Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang.
- 3) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim, seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN/KETERANGAN
1	R M S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Lbt (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Mrb)	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
2	S S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Stb	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
3	M Y S, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Tjk	Sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat
4	Letkol Chk H M, S.H., M.H.	Kadilmil Mks	Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Landasan hukum penyelenggaraan MKH berdasarkan pada Pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY.09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH.



Gambar 4.2 Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2019

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.1 Hukuman Disiplin Tahun 2019

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	26	13	46	85
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2	Panitera	3	3	11	17
3	Sekretaris	-	-	2	2
4	Panitera Muda	6	3	5	14
5	Panitera Pengganti	9	5	6	20
6	Jurusita	2	-	1	3
7	Jurusita Pengganti	2	-	4	6
8	Pejabat Struktural	6	-	3	9
9	Staf	13	3	3	19
10	Calon Hakim	2	1	-	3
Jumlah		69	29	81	179

Badan Pengawasan juga mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan, sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.4.2 Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	55
2.	Panitera	6
3.	Sekretaris	1
4.	Panitera Muda	7
5.	Panitera Pengganti	5
6.	Jurusita	6
7.	Jurusita Pengganti	5
8.	Pejabat Struktural	-

9.	Staf	2
10.	Calon Hakim	-
11.	Honorar	4
TOTAL		91

4. Penguatan Sistem Pengawasan

a. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan

Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan dengan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan serta Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Seluruh Pengadilan Tingkat Banding.

Tabel 4.5 Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2019

No	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Bali 28 sampai dengan 30 Maret 2019	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama	64 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan Seluruh Pengadilan Se Wilayah Bali
2	Bangka Belitung 20 sampai dengan 22 Juni 2019	Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	28 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Sewilayah Bangka Belitung
3	Makassar 22 sampai dengan 24 Agustus 2019	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Wakil Ketua Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	124 orang	Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Sewilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
4	Banten dan DKI Jakarta 29 sampai dengan 31 Agustus 2019	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah	72 orang	Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan
5	Manado 27 sampai dengan 29 Juni 2019	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama	60 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan Seluruh Pengadilan Sewilayah Sulawesi Utara
6	Batam 28 sampai dengan 30 November 2019	Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	38 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Sewilayah Propinsi Kepulauan Riau

Materi yang disampaikan pada Rapat Koordinasi sebagai berikut:



Gambar 4.3.1 : Materi Rapat Koordinasi

b. *Consulting* Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai sebagian para Hakim, Panitera, Sekretaris, yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan maka Badan Pengawasan mengadakan kegiatan *Consulting*, dengan materi diantaranya: Gratifikasi, LHKPN, Pemuliaan Peradilan, Penilaian Zona Integritas dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan *Consulting* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan Implementasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2019 dengan peserta Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Jambi dengan jumlah peserta 63 orang.

c. Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Quality Assurance (QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, adanya jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan *output* yang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses yang diperlukan dan pelayanan yang diberikan. QA merupakan kegiatan yang meliputi usaha pemantauan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinerja seluruh aparatur peradilan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah dengan diadakannya *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok, seperti misalnya membahas temuan yang berkaitan dengan:

1. Keuangan perkara dan keuangan DIPA.
2. Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yang berlaku.
3. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan

berbasis kas ke basis akrual. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

1. Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.
2. Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pada tahun 2019 *Quality Assurance* dilaksanakan di Kupang tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2019 dengan peserta Wakil Ketua, Panitia dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan jumlah peserta 96 (sembilan puluh enam) orang.



Gambar 4.3.2 : Rapat Koordinasi, Consulting dan Quality Assurance

Secara garis besar rumusan hasil pembahasan *QA* tersebut adalah:

1. Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
2. Keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga harus berpedoman pada kebijakan Mahkamah Agung.
3. Badan Pengawasan melakukan identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan Perkara sehingga diperoleh peta risiko beserta mitigasinya.

5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 58 (lima puluh delapan) Satuan Kerja (Satker), seperti tabel berikut:

Tabel 4.6.1 Data Pengawasan Reguler Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	7	7	9	5	28
Peradilan Agama	5	3	6	5	19
Peradilan Militer	1	2	0	0	3
Peradilan TUN	2	2	4	0	8
Total					58

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.6.2 Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2019

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	136	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2	Administrasi Persidangan	213	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara
3	Administrasi Perkara	322	Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
4	Administrasi Umum	662	Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll.
5	Kinerja Pelayanan Publik	181	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

b. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat dan Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Perwakilan melakukan pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu:

Tabel 4.6.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
3.	Pengadilan Pajak	4.	Pengadilan Negeri Yogyakarta
5.	Pengadilan Negeri Makassar	6.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
7.	Pengadilan Tinggi Makassar	8.	Pengadilan Negeri Medan
9.	Pengadilan Negeri Samarinda	10.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

11.	Pengadilan Tinggi Samarinda	12.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
13.	Pengadilan Tinggi Semarang	14.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
15.	Pengadilan Negeri Semarang	16.	Pengadilan Negeri Tangerang
17.	Pengadilan Negeri Surabaya	18.	Pengadilan Tinggi Banten

Maksud dan Tujuan dilakukan pemeriksaan Reguler bersama:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:

1. Penanganan Perkara Perdata.
2. Penanganan Perkara Pidana.
3. Penanganan Perkara TUN.
4. Pengadilan Pajak

6. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan dalam Tahun 2019, telah melakukan pemeriksaan monitoring tersebut pada 96 (sembilan puluh enam) Satuan Kerja (Satker), seperti tabel berikut:

Tabel 4.7 Data Pemeriksaan Monitoring Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	16	16	9	13	54
Peradilan Agama	11	8	3	7	29
Peradilan Militer	0	3	1	0	4
Peradilan TUN	4	3	0	2	9
Total					96

7. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor: 1/BP/SK/I/2019 tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung, sebagai dasar kegiatan melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan untuk tahun 2019 pada penerimaan pengaduan dari masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas informasi, dan keseluruhan dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/penerimaan pengaduan Badan Pengawasan untuk dicatat agenda nomornya dengan diberikan kode pengaduan secara khusus dari Satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima 18 (delapan belas) berkas pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 4 (empat) berkas pengaduan.
2. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 7 (tujuh) berkas pengaduan.
3. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 4 (empat) berkas pengaduan.
4. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 3 (tiga) berkas pengaduan.

8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan publik pada 97 (sembilan puluh tujuh) Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	18	19	15	7	59
Peradilan Agama	5	12	6	4	27
Peradilan TUN	2	1	2	1	6
Peradilan Militer	0	3	2	0	5
Total	25	35	25	12	97

Catatan :

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

a. Hasil temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidangan keuangan perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

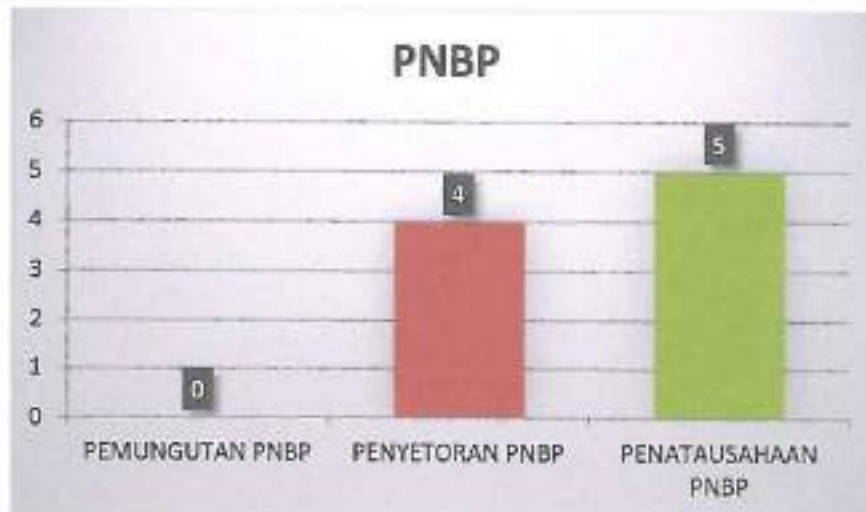


Grafik 4.1.1 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni mencapai 99 (sembilan puluh sembilan) temuan (45,62%) dari 217 (dua ratus tujuh belas) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.

b. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2019, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik 4.1.2 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNB Tahun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNB menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan PNB lebih dominan yakni mencapai 5 (lima) temuan (55,56%) dari 9 (sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penatausahaan PNB sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

c. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2019, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik 4.1.3 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang pelayanan publik menggambarkan temuan terkait kualitas standar pelayanan mencapai 42 (empat puluh dua) temuan (36,52%) dari 115 (seratus lima belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya kualitas standar pelayanan sesuai aturan yang berlaku.

9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud untuk:

- Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
- Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
- Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel 4.9.1 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah I

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	1	-	-	-
3	>70 – 80	BB	7	7	1	1
4	>60 – 70	B	1	2	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-

6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	1

Tabel 4.9.2 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah II

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)							
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI	DILMIL TAMA	ESELON I
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	1	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	6	4	-	1	1	7
4	>60 – 70	B	1	1	2	1	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-	-	-
Jumlah			7	6	2	2	1	7

Tabel 4.9.3 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah III

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	4	8	1	-
4	>60 – 70	B	4	1	-	-
5	>50 – 60	CC	1	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	0

Tabel 4.9.4 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah IV

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	2	3	-	-
3	>70 – 80	BB	3	1	-	-
4	>60 – 70	B	-	1	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			5	5	0	0

Capaian nilai SAKIP tahun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan), BB (sangat baik) dan B (baik), hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

10. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pada tahun 2019 sebagai upaya peningkatan kualitas layanan peradilan telah terbit Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan 31 Mei 2019, Tim Penilai Internal menyampaikan laporan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit kerja telah dievaluasi, dengan rincian sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 24 (dua puluh empat) belum dapat diusulkan memperoleh predikat WBK tahun 2019 ini. Dari 174 (seratus tujuh puluh empat) unit kerja 16 (enam belas) diantaranya diusulkan melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Berdasarkan hasil Rekapitulasi perolehan nilai per Area 174 satker yang diusulkan Area I - Manajemen Perubahan (51%), Area IV - Penguatan Akuntabilitas (74%), dan Area VI - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (35%) merupakan area dengan persentase capaian tertinggi dalam *range* nilai 90 - 100. Namun demikian, dari rekapitulasi tersebut juga dapat dilihat bahwa Area V - Penguatan Pengawasan (17%) dan Area III - Penataan Sistem Manajemen SDM (12%) merupakan area dengan persentase tertinggi pada *range* nilai 60-69,99 dan menjadi area dengan persentase terendah (16% dan 26%) pada *range* nilai 90-100.

Perolehan nilai pada Area III Penataan Sistem Manajemen SDM dan Area V Penguatan Pengawasan tersebut sangat mempengaruhi nilai keseluruhan lembar kerja evaluasi dikarenakan Area III dan Area V merupakan 2 Area dengan nilai tertinggi (15). Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Area III Penataan Sistem Manajemen SDM dan Area V Penguatan Pengawasan menjadi titik lemah yang perlu diperkuat unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Adapun rincian Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK Tahun 2019:

A. Satuan Kerja Mandatori (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) sejumlah 16 (enam belas) satuan kerja

Tabel 4.10.1 Satuan Kerja Mandatori (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Negeri Medan	2	Pengadilan Negeri Bandung
3	Pengadilan Negeri Surabaya	4	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
5	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	6	Pengadilan Negeri Balikpapan
7	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	8	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
9	Pengadilan Negeri Pontianak	10	Pengadilan Negeri Semarang
11	Pengadilan Negeri Padang	12	Pengadilan Negeri Makassar
13	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	14	Pengadilan Negeri Pekanbaru
15	Pengadilan Negeri Banjarmasin	16	Pengadilan Negeri Manado

B. Satuan Kerja yang diajukan kembali memperoleh predikat WBK sejumlah 15 (lima belas) satuan kerja

Tabel 4.10.2 Satuan Kerja Yang Diajukan Kembali Memperoleh Predikat WBK

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	2	Pengadilan Militer III-12 Surabaya
3	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	4	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	6	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
7	Pengadilan Agama Stabat	8	Pengadilan Negeri Sekayu
9	Pengadilan Negeri Mempawah	10	Pengadilan Agama Lubuk Basung
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	12	Pengadilan Negeri Banyuwangi
13	Pengadilan Negeri Bau Bau	14	pengadilan Negeri Situbondo
15	Pengadilan Negeri Tanjungkarang		

C. Satuan Kerja diusulkan memperoleh predikat WBK secara reguler sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) satuan kerja

Tabel 4.10.3 Satuan Kerja Diusulkan Memperoleh Predikat WBK Secara Reguler

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	2	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	4	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
5	Pengadilan Agama Probolinggo	6	Pengadilan Tinggi Agama Medan
7	Pengadilan Agama Sidoarjo	8	Pengadilan Tinggi Ambon
9	Pengadilan Negeri Sidoarjo	10	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	12	Pengadilan Negeri Ambon
13	Pengadilan Agama Jambi	14	Pengadilan Agama Makassar
15	Pengadilan Negeri Masohi	16	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
17	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	18	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
19	Pengadilan Agama Banjarbaru	20	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
21	Pengadilan Agama Semarang	22	Pengadilan Agama Bekasi
23	Pengadilan Negeri Kayuagung	24	Pengadilan Negeri Bekasi
25	Pengadilan Negeri Martapura	26	Pengadilan Agama Surakarta
27	Pengadilan Tinggi Medan	28	Pengadilan Agama Gorontalo
29	Pengadilan Agama Martapura	30	Pengadilan Tinggi Gorontalo
31	Pengadilan Agama Mataram	32	Pengadilan Tinggi Denpasar
33	Pengadilan Negeri Jambi	34	Pengadilan Negeri Gianyar
35	Pengadilan Negeri Sengeti	36	Pengadilan Negeri Mojokerto
37	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	38	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
39	Pengadilan Negeri Praya	40	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
41	Pengadilan Militer I-03 Padang	42	Pengadilan Militer Utama Jakarta
43	Pengadilan Agama Banyuwangi	44	Pengadilan Militer Tinggi Jakarta
45	Pengadilan Agama Bandung	46	Pengadilan Negeri Singkawang
47	Pengadilan Agama Banjarmasin	48	Pengadilan Negeri Muara Enim

49	Pengadilan Agama Situbondo	50	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
51	Pengadilan Negeri Banda Aceh	52	Pengadilan Negeri Kediri
53	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	54	Pengadilan Negeri Bitung
55	Pengadilan Agama Jakarta Timur	56	Pengadilan Negeri Tondano
57	Pengadilan Agama Pontianak	58	Pengadilan Negeri Soasio
59	Pengadilan Negeri Kepanjen	60	Pengadilan Agama Soasio
61	Pengadilan Militer III-16 Makassar	62	Pengadilan Negeri Metro Kelas IB
63	Pengadilan Negeri Malang	64	Pengadilan Tinggi Jayapura
65	Pengadilan Agama Pekanbaru	66	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
67	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	68	Pengadilan Negeri Parepare
69	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	70	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
71	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	72	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
73	Pengadilan Agama Mojokerto	74	Pengadilan Agama Batam
75	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	76	Pengadilan Tinggi Padang
77	Pengadilan Negeri Kendari	78	Pengadilan Tinggi Agama Padang
79	Pengadilan Agama Kendari	80	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
81	Pengadilan Agama Lamongan	82	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
83	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	84	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
85	Pengadilan Tinggi Bengkulu	86	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
87	Pengadilan Tinggi Kupang	88	Pengadilan Negeri Bale Bandung
89	Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur	90	Pengadilan Agama Sungguminasa
91	Pengadilan Negeri Gresik	92	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang
93	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	94	Pengadilan Tinggi Palembang
95	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	96	Pengadilan Negeri Temanggung
97	Pengadilan Negeri Blora	98	Pengadilan Negeri Langsa
99	Pengadilan Negeri Pati	100	Pengadilan Negeri Kuala Simpang
101	Pengadilan Negeri Mataram	102	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
103	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	104	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
105	Pengadilan Negeri Wates	106	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
107	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	108	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
109	Pengadilan Tinggi Agama Palu	110	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
111	Pengadilan Agama Blitar	112	Pengadilan Agama Purwodadi
113	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	114	Pengadilan Negeri Demak
115	Pengadilan Negeri Samarinda	116	Pengadilan Agama Indramayu
117	Pengadilan Agama Samarinda	118	Pengadilan Negeri Indramayu
119	Pengadilan Negeri Surakarta	120	Pengadilan Agama Depok
121	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	122	Pengadilan Negeri Depok
123	Pengadilan Negeri Sampit	124	Pengadilan Negeri Tangerang
125	Pengadilan Agama Sampit	126	Pengadilan Agama Tangerang
127	Pengadilan Agama Tulungagung	128	Pengadilan Agama Palu
129	Pengadilan Negeri Tulungagung	130	Pengadilan Negeri Gorontalo
131	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	132	Pengadilan Negeri Tilamuta
133	Mahkamah Syar'iyah Aceh	134	Pengadilan Tinggi Semarang
135	Pengadilan Tinggi Manado	136	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
137	Pengadilan Tinggi Samarinda	138	Pengadilan Agama Bantul

139	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	140	Pengadilan Negeri Oelamasi
141	Pengadilan Tinggi Pontianak	142	Pengadilan Agama Kupang
143	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak		

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tanggal 1 Agustus 2019 sesuai Surat Tugas Nomor 584/BP/ST/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1143/SEK/OT.01.1/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 Hal Permintaan Tindak Lanjut Atas Usulan Tambahan Pengadilan sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan reviu atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 4 (empat) unit kerja dengan hasil 3 (tiga) unit kerja dapat diusulkan memperoleh predikat WBK Tahun 2019.

Adapun tambahan satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat menuju WBK tahun 2019 bertambah 3 (tiga) unit kerja yakni sebagai berikut:

Tabel 4.10.4 Satuan Kerja Tambahan Yang Diusulkan Predikat Menuju WBK

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Negeri Klaten
2	Pengadilan Negeri Bogor
3	Pengadilan Agama Cikarang

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ditetapkan 63 (enam puluh tiga) pengadilan yang mendapat predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. 63 (enam puluh tiga) pengadilan tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pengadilan dari lingkungan peradilan agama, 27 (dua puluh tujuh) pengadilan dari lingkungan peradilan umum, 5 (lima) pengadilan dari lingkungan peradilan militer dan 3 (tiga) pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara.

Tabel 4.10.5 Satuan Kerja Yang Mendapat Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

27 Lingkungan Peradilan Umum			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	2	Pengadilan Negeri Kediri
3	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	4	Pengadilan Negeri Martapura
5	Pengadilan Tinggi Denpasar	6	Pengadilan Negeri Mojokerto
7	Pengadilan Tinggi Medan	8	Pengadilan Negeri Muara Enim
9	Pengadilan Tinggi Semarang	10	Pengadilan Negeri Oelamasi
11	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	12	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14	Pengadilan Negeri Pekanbaru
15	Pengadilan Tinggi Ambon	16	Pengadilan Negeri Sampit
17	Pengadilan Negeri Bandung	18	Pengadilan Negeri Surabaya
19	Pengadilan Negeri Bekasi	20	Pengadilan Negeri Surakarta
21	Pengadilan Negeri Bogor	22	Pengadilan Negeri Tangerang
23	Pengadilan Negeri Gianyar	24	Pengadilan Negeri Wates

25	Pengadilan Negeri Gorontalo	26	Pengadilan Negeri Yogyakarta
27	Pengadilan Negeri Indramayu		
28 Lingkungan Peradilan Agama			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	2	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
3	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	4	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
5	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	6	Pengadilan Agama Jakarta Timur
7	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	8	Pengadilan Agama Jambi
9	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	10	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
11	Mahkamah Syariah Kualasimpang	12	Pengadilan Agama Lamongan
13	Pengadilan Agama Bandung	14	Pengadilan Agama Makassar
15	Pengadilan Agama Banjarbaru	16	Pengadilan Agama Martapura
17	Pengadilan Agama Banjarmasin	18	Pengadilan Agama Mojokerto
19	Pengadilan Agama Batam	20	Pengadilan Agama Pekanbaru
21	Pengadilan Agama Bekasi	22	Pengadilan Agama Semarang
23	Pengadilan Agama Blitar	24	Pengadilan Agama Sumbawa Besar
25	Pengadilan Agama Gorontalo	26	Pengadilan Agama Sungguminahasa
27	Pengadilan Agama Indramayu	28	Pengadilan Agama Tangerang
3 Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta	2	Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang		
5 Lingkungan Peradilan Militer			
No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	2	Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin
3	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	4	Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
5	Pengadilan Militer Utama Jakarta		

11. Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung www.siwaskmahkamahagung.go.id.
2. Layanan pesan singkat / SMS / WhastApp.
3. Surat elektronik (email).
4. Faksimile.
5. Telepon.
6. Meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Surat dan atau.
8. Kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan MARI meliputi seluruh pengaduan baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2019 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI sejumlah 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) pengaduan mengenai pungli di pengadilan sejumlah 73 pengaduan.

Atas pengaduan tersebut, dilakukan penelaahan apakah pengaduan memenuhi syarat dan cukup bukti serta logis atau tidak. Apabila ada yang dirasakan masih kurang bukti, Badan Pengawasan MARI selaku pelaksana UPP MARI melakukan konfirmasi (permintaan tambahan bukti) kepada Pelapor, dan apabila berdasarkan hasil telaah dinyatakan telah cukup bukti, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan untuk melakukan penelusuran terhadap kebenaran pengaduan tersebut.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap 52 (lima puluh dua) satuan kerja pengadilan pada empat lingkungan peradilan terhadap dugaan adanya pungli terhadap pelayanan publik, yaitu:

Tabel 4.11 : Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Pemantauan Dan Penyelidikan

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	2	Pengadilan Militer I-04 Palembang
3	Pengadilan Tinggi Banten	4	Pengadilan Negeri Martapura
5	Pengadilan Tinggi Agama Banten	6	Pengadilan Agama Martapura
7	Pengadilan Tinggi Semarang	8	Pengadilan Tinggi Mataram
9	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	10	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	12	Pengadilan Tinggi Palu
13	Pengadilan Agama Bogor	14	Pengadilan Tinggi Agama Palu
15	Pengadilan Negeri Blitar	16	Pengadilan Negeri Balikpapan
17	Pengadilan Agama Blitar	18	Pengadilan Agama Balikpapan
19	Pengadilan Negeri Malang	20	Pengadilan Militer I-07 Palembang
21	Pengadilan Agama Malang	22	Pengadilan Tinggi Bengkulu
23	Pengadilan Negeri Cilacap	24	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
25	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	26	Pengadilan Negeri Serang
27	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	28	Pengadilan Agama Serang
29	Pengadilan Negeri Kendal	30	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
31	Pengadilan Agama Kendal	32	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
33	Pengadilan Agama Ambarawa	34	Pengadilan Agama Raskasbitung
35	Pengadilan Negeri Ungaran	36	Pengadilan Negeri Martapura
37	Pengadilan Negeri Kepanjen	38	Pengadilan Agama Martapura
39	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	40	Pengadilan Tinggi Mataram
41	Pengadilan Negeri Kudus	42	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
43	Pengadilan Agama Kudus	44	Pengadilan Tinggi Palu
45	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	46	Pengadilan Tinggi Agama Palu
47	Pengadilan Negeri Mungkid	48	Pengadilan Agama Binjai
49	Pengadilan Negeri Medan	50	Pengadilan Negeri Denpasar
51	Pengadilan Negeri Gianyar	52	Pengadilan Negeri Ternate

Hasil dari pemantauan yang dilakukan Tim UPP diserahkan kepada Kepala Badan Pengawasan MARI selaku Ketua UPP MARI untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan MARI. Produk UPP ini merupakan dokumen dan data serta bukti (*evidence*) tentang dugaan adanya pungutan liar yang diperoleh Tim UPP dan

digunakan untuk bukti dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa, sebagai tindaklanjut dari temuan UPP.

Pada tahun 2019 tim saber pungi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Wonosobo untuk selanjutnya dijatuhi hukuman disiplin.

12. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check on the spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan MARI menilai bahwa sidak salah satu metode yang efektif untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja maupun perilaku Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Tahun 2019 telah dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) sejumlah 41 (empat puluh satu) satuan kerja, sebagai berikut:

Tabel 4.12 Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Sidak

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	2	Pengadilan Agama Kudus
3	Pengadilan Tinggi Banten	4	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
5	Pengadilan Tinggi Agama Banten	6	Pengadilan Militer I-04 Palembang
7	Pengadilan Tinggi Semarang	8	Pengadilan Negeri Mungkid
9	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	10	Pengadilan Negeri Martapura
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	12	Pengadilan Agama Martapura
13	Pengadilan Agama Bogor	14	Pengadilan Tinggi Mataram
15	Pengadilan Negeri Blitar	16	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
17	Pengadilan Agama Blitar	18	Pengadilan Tinggi Palu
19	Pengadilan Negeri Malang	20	Pengadilan Tinggi Agama Palu
21	Pengadilan Agama Malang	22	Pengadilan Negeri Balikpapan
23	Pengadilan Negeri Cilacap	24	Pengadilan Agama Balikpapan
25	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	26	Pengadilan Militer I-07 Palembang
27	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	28	Pengadilan Tinggi Bengkulu
29	Pengadilan Negeri Kendal	30	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
31	Pengadilan Agama Kendal	32	Pengadilan Negeri Serang
33	Pengadilan Agama Ambarawa	34	Pengadilan Agama Serang
35	Pengadilan Negeri Ungaran	36	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
37	Pengadilan Negeri Kepanjen	38	Pengadilan Negeri Raskasbitung
39	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	40	Pengadilan Agama Raskasbitung
41	Pengadilan Negeri Kudus		

13. Penyamaran (Mystery Shopping)

Mystery Shopping (MS) adalah sebuah tehnik yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan, atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan. Penilaian dan

pengumpulan informasi ini dilakukan secara rahasia, sedangkan orang yang melakukan tugas rahasia tersebut dinamakan *Mystery Shopper*. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mengadopsi metode ini sebagai salah satu metode mengukur kualitas pelayanan di pengadilan. Kegiatan tersebut dinamakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).

Tahun 2019, telah dilakukan *Mystery Shopping*, yaitu:

1. Pengadilan Agama Binjai.
2. Pengadilan Negeri Medan.
3. Pengadilan Negeri Gianyar.
4. Pengadilan Negeri Denpasar.
5. Pengadilan Negeri Ternate.

14. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP dimaksudkan bukan hanya sebagai upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku (*soft factor*) Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai instansi/lembaga.

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang sehat (*good governance*) pemerintah telah menetapkan target Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Bidang Aparatur Negara pada sasaran pertama yaitu Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel atas hasil penilaian tingkat kematangan (Maturitas) Implementasi SPIP Tahun 2019 pada level 3 (tiga).

Sejalan dengan tujuan tersebut Mahkamah Agung RI telah melakukan penilaian maturitas Implementasi SPIP terakhir di Tahun 2017 dengan nilai 2,1239 dan ditahun 2019 dibentuk tim Satgas melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP di lingkungan Mahkamah Agung yang antara lain bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP di Mahkamah Agung dan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di Lembaga Mahkamah Agung RI.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan tim satgas SPIP Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Merumuskan regulasi penilaian risiko melalui terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/Sek/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
2. Memfasilitasi pembentukan tim *counterpart* di 7 (tujuh) unit eselon 1 dan memfasilitasi perumusan manajemen risiko dimasing-masing unit tersebut dan pengumpulan *evidence* untuk keperluan evaluasi internal oleh tim *Assessor* Badan Pengawasan MA RI

3. Mengomunikasikan hasil pelaksanaan penilaian internal maturitas SPIP yang dilakukan oleh tim *Assessor* Badan Pengawasan dengan pendampingan tim BPKP kepada seluruh unit eselon I dan laporan akhir pelaksanaan penilaian maturitas SPIP kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk selanjutnya dimintakan QA (Quality assurance) oleh tim BPKP

Berdasarkan hasil evaluasi internal atas pelaksanaan SPIP lembaga disimpulkan bahwa terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mahkamah Agung RI Tahun 2019 yang dilakukan oleh tim *assessor* Badan Pengawasan MA RI dengan Pendampingan Tim BPKP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 (tiga) dari 6 (enam) tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 (dua puluh lima) fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP sebesar "3,645".

Dengan tingkat maturitas "Terdefinisi", maka karakteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Mahkamah Agung RI:

1. Telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan pokok unit organisasi dalam K/L/Pemda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Telah sepenuhnya mengomunikasikan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RI.
3. Telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RI dan mendokumentasikannya secara konsisten.
4. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan pokok unit organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RI secara berkala dan terdokumentasi.
5. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tersebut telah diusulkan dan saat ini dalam proses penilaian akhir maturitas SPIP oleh tim *Quality Assurance* BPKP untuk menguji dan atau mengevaluasi hasil penilaian oleh tim *internal/self assesment (Assessor)* dengan pendampingan tim BPKP) 3,32 dapat diterima sepenuhnya atau terkoreksi.

15. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Penyelenggaraan PIPK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dimulai pada akhir bulan Juli 2019, Auditor Badan Pengawasan mulai menyiapkan rencana kerja penyiapan Tim Penilai PIPK melalui rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan unit eselon I di Lingkungan MARI. Untuk pertama kalinya MARI melalui Keputusan Sekretaris MARI Nomor 683/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

MARI tanggal 30 Agustus 2019 membentuk Tim Penilai PIPK yang beranggotakan aparatur yang memiliki pengalaman dalam penyusunan Laporan Keuangan, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran pada unit eselon I di lingkungan MARI.

Dalam rangka menyiapkan kompetensi Tim Penilai telah diselenggarakan Pelatihan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan MARI yang difasilitasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan 6 September 2019 bertempat di Megamendung Jawa Barat diikuti oleh seluruh anggota Tim Penilai dengan fasilitator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI dan Badan Pengawasan MARI. Diharapkan Auditor Badan Pengawasan MARI dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 mendatang terlebih dahulu melakukan reviu atas Penilaian PIPK berdasarkan Laporan dari Tim Penilai PIPK.

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.13 Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<p>Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali meliputi reviu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018 pada bulan Februari 2019. 2) Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 pada bulan Juli 2019. 3) Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2018 pada bulan November 2019. <p>Catatan: Laporan Keuangan MA RI TA 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>Pembentukan Tim Penilai PIPK didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 683/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan MA RI sehingga Reviu PIPK difokuskan pada penguatan Tim Penilai PIPK tersebut yang baru memulai kegiatan Penilaian PIPK pada bulan November 2019.</p>

2	Reviu RKA K/L	<p>Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI bulan Juli 2019 pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak teralokasi dan atau salah pengalokasian). - Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM, pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat. - Alokasi pemeliharaan gedung dan kendaraan belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya, dan volume <i>output</i> riil aset (BMN) <i>existing</i> sebagai basis data pengusulan alokasi. <p>Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya didukung dan dilampirkan dengan data dukung sesuai ketentuan dan terdapat sejumlah kegiatan pembangunan gedung kantor satker baru tidak dapat direviu karena data dukung tidak diperoleh.</p>
3	Reviu RKBMN Online	<p>Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2019 di Mahkamah Agung RI untuk Tahun Anggaran 2021.</p>
4	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 100,59% dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai mencapai 108,36% senilai Rp.3.269.295.616.760,00. b. Belanja Barang mencapai 86,08% senilai Rp.646.400.865.891,00. c. Belanja Modal mencapai 46,13% senilai Rp.78.384.540.502,00. <p>- Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 84,03 yakni Predikat Kualitas Belanja Baik.</p>
5	Pemeriksaan Keuangan	<p>Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif,</p>

		namun masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyeteroran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya.
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Pengadaan Barang/Jasa tahun ini dilakukan melalui dua pendekatan yakni untuk pekerjaan fisik belum selesai 100% dilakukan melalui <i>Probity Audit</i> dan untuk pekerjaan fisik telah mencapai 100% dilakukan melalui Audit Pengadaan Barang/Jasa. - Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat penyelesaian pembangunan yang berpotensi selesai tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan. - Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui <i>e-purchasing</i> telah optimal.
8	<i>Liaison Officer</i> (LO)	<p>Sepanjang tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan beberapa kali penugasan pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 37/ST/V-XVI.1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah selama 65 (enam puluh lima) hari. 2. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 156/ST/V-XVI.1/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (sampai dengan triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di

		<p>Jakarta selama 10 (sepuluh) hari.</p> <p>3. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 196/ST/V-XVLI.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (sampai dengan triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara selama 45 (empat puluh lima) hari.</p> <p>4. Penugasan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I Tahun 2019 dan Semester II tahun 2019.</p> <p>5. Penugasan pemantauan penyelesaian kerugian negara semester I Tahun 2019 dan Semester II tahun 2019.</p> <p>Untuk mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut, kesepahaman hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu antara BPK dengan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, serta untuk memperoleh capaian penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK sesuai rekomendasi dan penyelesaian kerugian negara diatas 80%, maka diperlukan adanya <i>Liaison Officer</i> (LO) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas seluruh penugasan BPK pada Mahkamah Agung RI.</p>
9	Reviu Revaluasi BMN	<p>Walaupun tidak memiliki target kinerja tahun anggaran 2019, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada beberapa wilayah, seperti Wilayah Jawa Barat, Wilayah Jawa Timur, Wilayah Kalimantan Barat, Wilayah Maluku dan Wilayah Jayapura.</p> <p>Badan Pengawasan juga telah melaksanakan reviu atas penilaian kembali BMN pada Unit Akuntansi Pengguna Barang Mahkamah Agung RI, dilaksanakan atas data sampling pemeriksaan BPK tahun 2018 sejumlah 1027 NUP BMN.</p>

	Secara umum hasil pelaksanaan revidu adalah: 1. Revidu atas Penyediaan Data Awal (Persiapan Inventarisasi BMN) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Revidu atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--	---

D. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

- a. Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) temuan pemeriksaan dengan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK hingga Semester II tahun 2019 sebanyak 1.033 (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi atau sebesar 92,15% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 (sebelas) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 0 (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- b. Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebesar Rp42.869.200.522,00. nilai rekomendasi sebesar Rp33.997.443.502,00. Hingga Semester II tahun 2019 sebesar Rp28.613.370.975,00. sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 84,16%, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.800.266.156,00. atau sebesar 14,12% dan nilai sebesar Rp583.806.372,00 atau sebesar 1,72% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebesar Rp32.588.694.000,00.

Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK RI Semester II tahun 2019.

E. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA-RI)

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2019 masyarakat umum yang secara langsung menggunakan aplikasi siwas sebagai berikut:

Tabel 4.14 Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui SIWAS MA-RI

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelapor secara mandiri	560
2	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	221

E. Internal Audit Capability Model (IACM)

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* atau model kapabilitas audit intern. IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bagi terwujudnya unit audit internal yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi yang perlu diikuti oleh organisasi sektor publik dalam mengembangkan unit audit intern yang efektif memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi. IACM menunjukkan langkah-langkah perkembangan unit audit intern dari level yang kurang mapan menuju level yang kuat dan efektif.

Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 dari BPKP diperoleh hasil **Level 3 Penuh** dengan rincian sebagai berikut:

SIMPULAN KESELURUHAN: LEVEL 3



Grafik 4.2 IACM Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI akan terus meningkatkan capaian nilai IACM tersebut sampai dengan level 4 penuh, ditargetkan pada tahun 2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI akan meraih level 4 secara penuh.

G. Capaian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2019

Pemeriksaan/Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target
	I	II	III	IV		
Kasus	54	85	40	26	205	175
Reguler	15	14	19	10	58	54
Pemeriksaan Kinerja dan ZI	26	35	25	11	97	83
Monitoring	30	31	13	22	96	57

Pemeriksaan Keuangan	4	13	2	2	21	10
Reviu LK	-	6	-	-	6	2
Reviu/verifikasi pernyataan yang telah direviu	-	8	-	-	8	2
Reviu Hibah	-	5	-	-	5	2
Reviu Pengelolaan Anggaran	-	4	-	-	4	4
Reviu Perencanaan Anggaran	-	3	-	-	3	3
Reviu PNBK	-	3	-	-	3	3
Reviu PIPK	-	4	-	-	4	4
LKjIP	1	5	1	1	8	7
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4
Audit PBJ	1	1	1	1	4	4
SIDAK	26				37	40
Mystery Shopper	11					
TLHP BPK	21					10
LO Pendampingan	17					4
IACM	4					4
Maturitas SPIP	11					2
E-Government	2					1
Rakor Hakim Pengawas Bidang	Bangka Belitung : 28 Peserta					
	Batam : 38 Peserta					
	Denpasar : 64 Peserta					
	Manado : 60 Peserta					
Rakor Pengelolaan Penanganan Pengaduan	Banten dan DKI Jakarta : 72 Peserta					
	Sulawesi Selatan dan Barat : 124 Peserta					
Consulting	Jambi : 63 Peserta					
Quality Assurance	Kupang : 96 Peserta					
Assessment Hakim Tinggi Pengawas dan Yustisial	32 Peserta					

Catatan: Dari capaian, Realisasi Anggaran (99,83%)

Pagu : Rp33.650.414.000,00.

Realisasi : Rp33.594.292.582,00.

Sisa : Rp56.121.418,00.

H. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada tahun 2019 jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.768 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 18.494 (98,54 %).



Grafik 4.3 Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2019

I. Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pada Pengadilan

Pada Tahun 2019 Badan Pengawasan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan didukung oleh Proyek *SUSTAIN* EU-UNDP telah melakukan survey terhadap kepuasan pengguna layanan pengadilan pada 60 (enam puluh) satuan kerja pengadilan dari 3 (tiga) lingkungan peradilan yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan TUN di 20 (dua puluh) propinsi dari Aceh hingga Papua. Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tersebut diperoleh hasil indeks kepuasan publik terhadap lembaga peradilan berada pada kategori baik, yakni sebesar 76%. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan sebesar 6,7 % bila dibandingkan dengan indeks kepuasan yang ada pada tahun 2013.



Gambar 4.4. Penyerahan Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik pada Pengadilan

J. Penerimaan Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas peran aktif dan kontribusinya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia, melalui giat sosialisasi, test urine dan tersusunnya regulasi dari tingkat pusat sampai wilayah dari tahun 2017 sampai sekarang kepada calon Hakim, Panitera, dan Pegawai Mahkamah Agung dan pengadilan ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten / kota dengan bekerjasama dengan BNN, BNNP, dan BNNK / kota.



Gambar 4.5 Penerimaan Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko kepada Mahkamah Agung yang diwakili oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho Setiadji, SH, dalam rangka puncak peringatan hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2019.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Tahunan 2019, laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 dan sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, atas hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengelolaan

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorere.

Pada tahun 2019, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 167 orang yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 62 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 89 orang dan tenaga honorere berjumlah 16 orang.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2019, dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN) dikelompokkan menjadi peralatan dan mesin 1880 unit dengan nilai Rp. 12.719.654.176, aset tetap lainnya 2.290 buah dengan Rp. 535.403.685, aset tak berwujud 12 unit senilai Rp. 3.254.333.180, Sehingga total pengelolaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp. 16.509.391.041

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2019 adalah 90 Unit dengan Total Rp 424.433.300 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

c. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2019 Tanggal 5 Desember 2018 dengan jumlah PAGU sebesar Rp. 33.650.412.000,- terdiri dari:

Tabel 5.1 : Pengelola Keuangan Pada DIPA Badan Pengawasan

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.598.113.000,-	Rp. 5.570.807.371,-	99,51
2	Belanja Barang	Rp. 27.625.513.000,-	Rp. 27.599.051.911,-	99,90
3	Belanja Modal	Rp 426.786.000,-	Rp. 424.433.300,-	99,45
	Jumlah	Rp 33.650.412.000,-	Rp 33.594.292.582,-	99,83%

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.952 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 1.942 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi / stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 211 pengaduan, Pengaduan Aplikasi Siwas sejumlah 781 pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 18 pengaduan.

3. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.

4. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan

5. Penguatan Sistem Pengawasan

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) wilayah yaitu: Bali, Bangka Belitung, Makassar, Banten dan DKI Jakarta, Manado, Batam, dan Jambi dengan total peserta sejumlah 449 orang.

Pada tahun 2019 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telah dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Kupang yang diikuti oleh 96 peserta terdiri dari Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler

Tahun 2019 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 58 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 28 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 19 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 3 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 8 satker.

b. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari KPK, Tim BPKP Pusat dan Tim BPKP Perwakilan melakukan pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Pajak, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Banten.

7. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan dalam Tahun 2019, telah melakukan pemeriksaan monitoring tersebut pada 96 (sembilan puluh enam) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Monitoring pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 54 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 29 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 4 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 9 satker.

8. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima 18 (delapan belas) berkas pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 4 (empat) berkas pengaduan.
2. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 7 (tujuh) berkas pengaduan.
3. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 4 (empat) berkas pengaduan.
4. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 3 (tiga) berkas pengaduan.

9. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan publik pada 97 (sembilan puluh tujuh) Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 59 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 27 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker.

10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (pelaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai A, 52 Satker (70,27%) memperoleh nilai BB, 14 Satker (18,91%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC.

Capaian nilai SAKIP tahun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan), BB (sangat baik) dan B (baik) hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

11. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan 31 Mei 2019, Tim Penilai Internal menyampaikan laporan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit kerja telah dievaluasi, dengan rincian sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 24 (dua puluh empat) belum dapat diusulkan memperoleh predikat WBK tahun 2019 ini. Dari 174 (seratus tujuh puluh empat) unit kerja 16 (enam belas) diantaranya diusulkan melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

12. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIP yaitu diantaranya :

- a) Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- b) Reviu RKA K/L, Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI bulan Juli 2019 pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020;
- c) Reviu RKBMN Online, Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2019 di Mahkamah Agung RI untuk TA 2021;
- d) Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ, Berdasarkan hasil reviu Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 100,59% dari rencana penyerapannya;
- e) Pemeriksaan Keuangan, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, namun masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya

- f) Audit Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan melalui dua pendekatan yakni untuk pekerjaan fisik belum selesai 100% dilakukan melalui *Probit Audit* dan untuk pekerjaan fisik telah mencapai 100% dilakukan melalui Audit Pengadaan Barang/Jasa;
- g) *Liaison Officer (LO)*, Sepanjang tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan 5 (lima) penugasan pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Mahkamah Agung RI
- h) Reviu Revaluasi BMN, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada beberapa wilayah.

13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) temuan pemeriksaan dengan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK hingga Semester II tahun 2019 sebanyak 1.033 (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi atau sebesar 92,15% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 (sebelas) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 0 (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebesar Rp42.869.200.522,00, nilai rekomendasi sebesar Rp33.997.443.502,00. Hingga Semester II tahun 2019 sebesar Rp28.613.370.975,00, sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 84,16%, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.800.266.156,00, atau sebesar 14,12% dan nilai sebesar Rp583.806.372,00 atau sebesar 1,72% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebesar Rp32.588.694.000,00. Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK RI Semester II tahun 2019.

B. Rekomendasi

Badan Pengawasan telah berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik, selain itu Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas beberapa kegiatan perlu lebih ditingkatkan adalah :

1. Kegiatan Assurance meliputi Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan *Keuangan*, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, *Consulting* dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan *Quality Assurance*.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Kegiatan rutin Badan Pengawasan yang perlu dilaksanakan dan lebih ditingkatkan antara lain:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)
2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : **89**/BP/SK/IX/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI,

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 117/KMA/SK/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung;
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan 2019 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019;
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menyusun laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua** : Menyusun Laporan Tahunan sesuai outline yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor: 117/KMA/SK/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung;

- Ketiga** : Melaporkan hasil penyusunan Laporan Tahunan 2019 kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Keempat** : Segala biaya yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Tahunan 2019 dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2019

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**



NUGROHO SETIADJI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 Nomor **89**/BP/SK/IX/2019
 Tentang: Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengawasan
 Mahkamah Agung RI Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Nugroho Setiadi, SH	Kepala Badan Pengawasan	Penanggung Jawab
2.	Dr.Drs. H. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H	Inspektur Wilayah I	Wakil Penanggung Jawab
3.	Aviantara, S.H., M.Hum	Inspektur Wilayah II	Wakil Penanggung Jawab
4.	H. Iswan Herwin, S.H., M.H	Pit. Inspektur Wilayah III	Wakil Penanggung Jawab
5.	H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum	Inspektur Wilayah IV	Wakil Penanggung Jawab
6.	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.	Sekretaris Badan Pengawasan	Ketua
7.	Sri Kamala Dewi, SH.MH	Kabag Kepegawaian	Anggota
8.	Hj. Yefni Delfitri, S.H., M.H	Kabag Umum	Anggota
9.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kabag Organisasi dan Tataaksana	Anggota
10.	Sodikin, S.E., S.H., M.H	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11.	R. Lucky Permama, S.H., M.H	Kasubbag Ketatalaksanaan	Anggota
12.	Eko Purwanto, ST, MH	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
13.	Rohili, S.H., MH	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
14.	Muhammad Adzkiya, S.E., M.Acc., C.A	Kasubbag Perenc. Program dan Peny. Anggaran	Anggota
15.	Dra. Yekti Handayani, S.H., M.Si	Kasubbag Tata Usaha IRWIL III	Anggota
16.	Wiwi Ismiyati, S.H., M.H	Kasubbag Tata Usaha IRWIL II	Anggota
17.	Nuzliana Abda, S.H., M.H	Kasubbag Tata Usaha IRWIL I	Anggota
18.	Mochtar Luthfi, S.H	Kasubbag Tata Usaha IRWIL IV	Anggota
19.	Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E, Ak., C.A., M.Ak	Auditor	Anggota
20.	Muhammad Anis, S.E, Ak., C.A., M.Ak	Auditor	Anggota
21.	Imam Purnomo, S.E, Ak., C.A	Auditor	Anggota
22.	Rama Rahim, S.E., M.M., MBA	Auditor	Anggota
23.	Hendra Basry, S.E., M.Ak	Auditor	Anggota
24.	Syarifullah M.Nur, S.Kom	Auditor	Anggota
25.	Sutrisno, S.H.I	Auditor Kepegawaian	Anggota
26.	Zulfan Sugiantoro, S.T	Pranata Komputer	Anggota
27.	Muhammad Huzaifah, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
28.	Dwi Wulan Indriani, S.Psi	Pelaksana/ Staf Bagian Ortala	Anggota
29.	Dewi Putri Novianari, S.Kom	Pelaksana/ Staf Bagian Ortala	Anggota
30.	Mawardi, S.H	Pelaksana/ Staf Bagian Ortala	Anggota
31.	Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom	Pelaksana/ Staf Bagian Ortala	Anggota

Jakarta, 30 September 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI


 NUGROHO SETIADI